



PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN

# RENSTRA

2025-2029

SEKRETARIAT DAERAH



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan kehadiran Allah SWT, atas rahmat, nikmat dan karunia-Nya sehingga Penyusunan Review Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2025-2029 dapat diselesaikan.

Sasaran dari suatu program/kegiatan akan dapat dicapai secara efektif dan efisien bila telah dirumuskan dengan mempertimbangkan dinamika lingkungan. Rencana Strategis (RENSTRA) merupakan 5 (lima) tahun ke depan yang disusun dengan mempertimbangkan berbagai situasi dan kondisi, terutama menyangkut keunggulan, peluang, kendala dan tantangan instansi pelaksana.

Dengan tersusunnya RENSTRA ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman dan arah dalam upaya mencapai sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Dengan disusunnya Review RENSTRA Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2025-2029 ini maka Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun mempunyai acuan umum tentang arah pembangunan kedepan. Arah ini tentu saja masih harus dirinci dan dijabarkan lebih lanjut menjadi Rencana Tahunan (RENJA), agar skala prioritas setiap program dan kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun lebih jelas dan terukur.

Renstra yang telah disusun ini tidak banyak artinya tanpa ditindaklanjuti dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang tuntas. Komitmen dan motivasi bisa timbul dari keberhasilan mengaktualisasikan diri dalam setiap kegiatan. Harapan kami RENSTRA ini dapat dijadikan skenario perencanaan pembangunan jangka menengah dan sekaligus sebagai acuan Rencana Kerja Tahunan bagi kita semua.

Tanjung Balai Karimun,

2025



## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI.....	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	4
1.3 Maksud dan Tujuan.....	6
1.4 Sistematika Penulisan .....	8
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH .....</b>	<b>10</b>
2.1 Gambaran Pelayanan Sekretariat Daerah .....	10
2.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah .....	10
2.3 Sumber Daya Sekretariat Daerah .....	29
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun .....	37
2.5 Kelompok Sasaran Layanan .....	40
2.6 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah .....	42
2.7 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Terpilih. ....	45
<b>BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....</b>	<b>51</b>
3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah .....	51
3.2 Strategi dan Arah Kebijakan .....	53
<b>BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....</b>	<b>597</b>
4.1 Uraian Kegiatan .....	58
4.2 Uraian Sub kegiatan .....	59
4.3 Program Prioritas .....	170
4.4 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan .....	168
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>1731</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>1732</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Perangkat Daerah harus memiliki Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD), Renstra Perangkat daerah disusun untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah.

Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) termasuk Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah diatur dalam Peraturan Bupati Karimun Nomor 96 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karimun Nomor 9 Tahun 2021 dan 69 Tahun 2019 Tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Sekretariat Daerah Tipe A dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tipe B.

Dalam kaitannya dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun, memiliki tugas pokok membantu kepala daerah serta mengkoordinasikan dan melaksanakan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan serta kegiatan lainnya, maka perlu penjabaran dalam suatu rencana strategis dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dimaksud. Oleh karena itu, diharapkan Rencana Strategis Sekretariat Daerah ini dapat dijadikan sebagai acuan oleh semua pihak terkait dalam bekerja secara sungguh-sungguh atas dasar konsepsi yang jelas dan berkesinambungan, sesuai dengan visi, misi dan program pemerintah dan khususnya dengan unit kerja di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun.

Rencana Strategis Sekretariat Daerah ini merupakan dokumen perencanaan yang memberikan arah yang memudahkan tujuan yang hendak dicapai secara terukur. Selain itu Rencana Strategis Sekretariat Daerah merupakan tanggung jawab Sekretaris Daerah dalam menyusun kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan

fungsi Sekretariat Daerah dengan berpedoman pada rencana Rencana Pembangunan Menengah Daerah serta dokumen perencanaan lainnya.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawabam, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja dinas/badan/kantor dan perangkat-perangkat daerah lainnya. Perencanaan strategis pemerintah juga merupakan integritas antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, lokal, nasional dan global namun tetap berada pada tatanan sistem manajemen nasional.

Dokumen Rencana Strategis Sekretariat Daerah yang disusun berfungsi sebagai landasan dalam penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah selama lima tahun ke depan, dan sebagai acuan untuk mencapai tujuan Sekretariat Daerah yang mendukung pencapaian visi dan misi Bupati Karimun.

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah terdiri atas:

1. RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah)
2. RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah)
3. Renstra PD (Rencana Strategis Perangkat Daerah)
4. RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah)
5. Renja PD (Rencana Kerja Perangkat Daerah)

Proses penyusunan Renstra PD melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Persiapan penyusunan Renstra PD

Persiapan penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah dilakukan dengan:

1. Membentuk Tim Penyusunan Dokumen Rencana Strategis dan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 245 Tahun 2021 Tanggal 21 Februari 2025 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Dokumen Rencana Strategis (Renstra) dan Dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun;
2. Melaksanakan orientasi mengenai Renstra untuk penyamaan persepsi dan memberikan pemahaman dalam penyusunan Renstra Setda;
3. Menyusun tata kala sebagai panduan kerja; dan
4. Mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan Renstra Setda.

b. Penyusunan Rancangan Awal Renstra PD

Pada tahap ini dilakukan analisis terhadap gambaran pelayanan Setda, analisis permasalahan, penelaahan dokumen Renstra Kementerian, analisis isu strategis, dan perumusan tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan indikator kinerja.

c. Penyusunan Rancangan Renstra PD

Rancangan Renstra Setda adalah penyempurnaan rancangan awal Renstra Setda yang dilakukan berdasarkan Surat Edaran Bupati Karimun Nomor B/00.7.2.4/2030/Tahun 2025 Tanggal 24 Maret 2025 tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karimun dan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029.

d. Penyusunan Rancangan Akhir Renstra PD

Tahap ini merupakan penyempurnaan rancangan Renstra Sekretariat Daerah menjadi rancangan akhir Renstra Setda dengan berpedoman pada RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

e. Penetapan Renstra PD

Rancangan akhir Renstra Setda ditetapkan dengan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Karimun setelah diverifikasi oleh Baperlitbang Kabupaten

Karimun.

## 1.2 Landasan Hukum

Landasan Penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun 2025–2029 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara

- Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Negara Kabupaten Karimun Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Karimun

- Nomor 3), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2023 Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 6 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Karimun Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Karimun Nomor 3);
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021 – 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3);
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2024 Nomor 5);
  16. Peraturan Bupati Karimun Nomor 96 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Sekretariat daerah Tipe A dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tipe B (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2022 Nomor 96);
  17. Peraturan Bupati Karimun Nomor 63 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2024 Nomor 63).

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2025 – 2029 dimaksudkan sebagai peta jalan perencanaan kinerja sekretariat daerah selama lima tahun dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Karimun, serta untuk memberikan gambaran yang jelas tentang tujuan, sasaran, program dan kegiatan serta indikator kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun. Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun yang disusun ini dapat dipertanggungjawabkan kinerjanya yang diukur dari sejauh mana pencapaian

terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai sebagai upaya ke depan untuk :

1. Menjamin keterkaitan, keserasian serta harmonisasi antar perencanaan, penganggaran, serta harmonisasi antar perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program kegiatan setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun ke depan, antar bagian yang ada di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun;
2. Terwujudnya komitmen dan konsistensi perencanaan serta pelaksanaan kegiatan yang dioperasionalkan secara konsekuen berdasarkan pada prioritas yang telah ditetapkan sesuai dengan kebutuhan serta kemampuan daerah yang didukung dengan sistem pengawasan dan pengendalian yang efektif;
3. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien serta menjamin adanya sustainability (kesinambungan) program dari waktu ke waktu.

#### Tujuan

Adapun tujuan rencana strategis adalah agar dimilikinya dokumen perencanaan selama periode tahun 2022-2026 yang akan menjadi arah dan pedoman atau acuan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Karimun. Tujuan tersebut antara lain adalah:

1. Menjabarkan arah RPJMD Kabupaten Karimun Tahun 2021-2026 ke dalam Rencana Strategis Sekretariat Daerah, agar terwujud sinkronisasi perencanaan pembangunan yang berkesinambungan;
2. Menjabarkan Visi dan Misi Kabupaten Karimun Tahun 2021-2026 ke dalam Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah Tahun 2022-2026;
3. Membangun komitmen, konsistensi dan kontinuitas perencanaan dengan pelaksanaan pembangunan.

## 1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2025 – 2029, disusun sebagai berikut :

### BAB I PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas latar belakang penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2025 – 2029.

#### 1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Memuat risalah tentang peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2025 – 2029.

#### 1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat uraian tentang maksud dan tujuan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2025 – 2029.

#### 1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2025 – 2029. serta susunan garis besar isi dokumen.

### BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH

#### 2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Memuat gambaran umum pelayanan Sekretris Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.

#### 2.2. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Memuat informasi tentang dasar hukum pembentukan, struktur organisasi serta tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

#### 2.3. Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat gambaran ringkas tentang sumber daya yang dimiliki Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya mencakup sumber daya manusia.

#### 2.4. Kelompok Sasaran Layanan

Menguraikan identifikasi kelompok sasaran layanan atau stakeholder yang mempengaruhi, menerima dan memperoleh dampak dari kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun.

## 2.5. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Memuat tentang permasalahan-permasalahan pelayanan Sekretariat Daerah dan Isu-isu Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun.

### BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

#### 3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah

Mengemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah berdasarkan fungsi sekretariat dalam mendukung sasaran Pembangunan Daerah.

#### 3.2. Strategi dan Arah Kebijakan

Menguraikan rumusan strategi dan arah kebijakan menengah Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2025-2029.

### BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

#### 4.1. Uraian Program Perangkat Daerah

Menguraikan rencana program Perangkat Daerah.

#### 4.2. Uraian Kegiatan, Sub Kegiatan Perangkat Daerah.

Berisikan uraian program, Kegiatan dan Sub Kegiatan beserta indikator kinerja dan pendanaannya.

#### 4.3. Program Prioritas Perangkat Daerah.

Memuat kinerja penyelenggara pemerintah daerah yang terdiri atas Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun yang mendukung pencapaian kinerja Kabupaten.

#### 4.4. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Memuat kinerja penyelenggara pemerintah daerah yang terdiri atas Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun yang mendukung pencapaian kinerja Kabupaten.

### BAB V PENUTUP

### LAMPIRAN

## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH

#### 2.1 Gambaran Pelayanan Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah merupakan unsur Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah. Sekretariat Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif kepada seluruh perangkat daerah. Gambaran umum Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun rinciannya, sebagai berikut :

#### 2.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah merupakan OPD yang menjalankan fungsi penunjang, secara struktural sekretariat daerah dilengkapi dengan empat level struktural organisasi. Struktur organisasi pada Sekretariat Daerah telah mengalami beberapa kali perubahan yaitu dilakukan penyederhanaan birokrasi yang menghilangkan seluruh struktur eselon 4. Sebelumnya, Sekretariat Daerah memiliki Eselon I, Eselon II, Eselon III. Adapun seluruh Eselon IV dialihjabatankan kepada jabatan fungsional hasil dari penyetaraan jabatan.

Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Karimun Nomor 96 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Karimun Nomor 69 Tahun 2019 Tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Sekretariat Daerah Tipe A dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tipe B.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan kewajiban tersebut, Sekretaris Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Pengkoordinasian perumusan kebijakan pemerintah daerah;
- b. Penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
- c. Pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana

Pemerintahan; dan

- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan tugas fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretaris Daerah Kabupaten Karimun dibantu oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Asisten Perekonomian dan Pembangunan dan Asisten Administrasi Umum.

Sekretariat Daerah, terdiri dari :

- a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, yang membawahi :
  1. Bagian Tata Pemerintahan
  2. Bagian Kesejahteraan Rakyat
  3. Bagian Hukum
  4. Bagian Pengelolaan Perbatasan dan Kerjasama.
- b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, yang membawahi:
  1. Bagian Perekonomian
  2. Bagian Administrasi Pembangunan
  3. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
  4. Bagian Perlengkapan.
- c. Asisten Administrasi Umum, yang membawahi:
  1. Bagian Umum dan Kepegawaian
  2. Bagian Organisasi
  3. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
  4. Bagian Perencanaan dan Keuangan.

Berikut ini penjabaran tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun.

1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan Daerah di bidang Tata Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat, Hukum, Pengelolaan Perbatasan dan Kerjasama, pengoordinasian penyusunan Kebijakan Daerah di bidang Kesejahteraan Rakyat, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kebijakan Daerah di bidang Tata

Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat, Hukum, Pengelolaan Perbatasan dan Kerjasama.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan Kebijakan Daerah di bidang Tata Pemerintahan, Hukum, Pengelolaan Perbatasan dan Kerjasama;
- b. Pengoordinasian Penyusunan Kebijakan Daerah di bidang kesejahteraan rakyat;
- c. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang Tata Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat, Hukum, Pengelolaan Perbatasan dan Kerjasama;
- d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kebijakan Daerah di bidang Tata Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat, Hukum, Pengelolaan Perbatasan dan Kerjasama;
- e. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kebijakan Daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang Kesejahteraan Rakyat; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah di bidang Tata Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat, Hukum, Pengelolaan Perbatasan dan Kerjasama yang berkaitan dengan tugasnya.

Untuk melaksanakan tugasnya, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dibantu oleh:

**A. Bagian Tata Pemerintahan**

Bagian Tata Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan Kebijakan Daerah, pengoordinasian perumusan Kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan, kajian dan evaluasi pelaksanaan Kebijakan Daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang Administrasi Pemerintahan, Administrasi Kewilayahan dan Otonomi Daerah.

Bagian Tata Pemerintahan mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan Kebijakan Daerah di bidang Administrasi Pemerintahan, Administrasi Kewilayahan dan Otonomi Daerah;
- b. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan Kebijakan Daerah di Bidang Administrasi Pemerintahan, Administrasi Kewilayahan dan Otonomi Daerah;
- c. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang Administrasi Pemerintahan, Administrasi Kewilayahan dan Otonomi Daerah;
- d. Penyiapan bahan pemantauan, kajian dari evaluasi pelaksanaan Kebijakan Daerah di bidang Administrasi Pemerintahan, Administrasi Kewilayahan dan Otonomi Daerah; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.

Uraian tugas Bagian Tata Pemerintahan sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan bahan pembinaan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum yang meliputi kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan Kepada Daerah;
- b. Mengumpulkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis pelaksanaan pembinaan dan penataan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan / atau kelurahan;
- c. Mengumpulkan bahan penyusunan rencana program, petunjuk teknis dan rencana kebijakan pelaksanaan pembinaan dan penataan penyelenggaraan Otonomi Daerah di daerah;
- d. Mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang yang menjadi kewenangan daerah; dan
- e. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditugaskan oleh pimpinan.

## B. Bagian Kesejahteraan Rakyat

Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan

penyiapan pengoordinasian perumusan Kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Keagamaan, Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat.

Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang Keagamaan, Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat;
- b. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang Keagamaan, Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat;
- c. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kebijakan Daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang Keagamaan, Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.

Uraian tugas Bagian Kesejahteraan Rakyat sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan bahan pengoordinasian perumusan Kebijakan Daerah di bidang Bina Mental Spiritual, Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat;
- b. Mengumpulkan bahan terhadap pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang Bina Mental Spiritual, Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat;
- c. Mengumpulkan dan mengolah data serta menyiapkan bahan penyusunan dan petunjuk teknis pembinaan dibidang Bina Mental Spiritual, Kesejahteraan Sosial dan Kemasyarakatan;
- d. Mengkoordinasikan dan mengumpulkan data di bidang Bina Mental Spiritual, Kesejahteraan Sosial dan Kemasyarakatan;
- e. Mengumpulkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kebijakan

Daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang Bina Mental Spiritual, Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat; dan

- f. Melaksanakan tugas kedinasan lain di bidang Bina Mental Spiritual Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan yang ditugaskan oleh pimpinan.

### C. Bagian Hukum

Bagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi penyusunan Peraturan Perundang-undangan yang menjadi kewenangan daerah, Bantuan dan Penyuluhan Hukum, Pelaksanaan Pelayanan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) serta Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Hukum yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Bagian Hukum mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyiapan bahan perumusan Kebijakan Daerah di bidang Dokumentasi dan Informasi, Perundang-Undangan, Bantuan, Penyuluhan Hukum dan HAM;
- b. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan Kebijakan Daerah di bidang Dokumentasi dan Informasi, Perundang-Undangan, Bantuan, Penyuluhan Hukum dan HAM;
- c. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang Dokumentasi dan Informasi, Perundang-Undangan serta Bantuan, Penyuluhan Hukum dan HAM;
- d. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang Dokumentasi dan Informasi, Perundang-Undangan, Bantuan, Penyuluhan Hukum dan HAM; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.

Uraian tugas Bagian Hukum sebagai berikut :

- a. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan Peraturan Perundang-Undangan yang menjadi kewenangan daerah;

- b. Melaksanakan tertib dokumentasi berbagai Peraturan Perundang-undangan yang ada di daerah;
- c. Menyusun petunjuk teknis dan pelaksanaan bantuan hukum terhadap pejabat daerah yang membutuhkan;
- d. Menyusun petunjuk teknis dan pelaksanaan penyuluhan hukum kepada masyarakat daerah; dan
- e. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang ditugaskan oleh Pimpinan.

**D. Bagian Pengelolaan Perbatasan dan Kerjasama**

Bagian Pengelolaan Perbatasan dan Kerjasama mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan Kebijakan Daerah, pengoordinasian perumusan Kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang Pengelolaan Batas Negara, Pengelolaan Infrastruktur dan Potensi Kawasan, Fasilitasi dan Evaluasi Kerjasama.

Bagian Pengelolaan Perbatasan dan Kerjasama mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang Pengelolaan Batas Negara, Pengelolaan Infrastruktur dan Potensi Kawasan, Fasilitasi dan Evaluasi Kerjasama;
- b. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang Pengelolaan Batas Negara, Pengelolaan Infrastruktur dan Potensi Kawasan, Fasilitasi dan Evaluasi Kerjasama;
- c. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang Pengelolaan Batas Negara, Pengelolaan Infrastruktur dan Potensi Kawasan, Fasilitasi dan Evaluasi Kerjasama;
- d. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kebijakan Daerah di bidang Pengelolaan Batas Negara, Pengelolaan Infrastruktur dan Potensi Kawasan, Fasilitasi dan Evaluasi Kerjasama; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.

Uraian tugas Bagian Pengelolaan Perbatasan dan Kerjasama sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan bahan perumusan Kebijakan Daerah di bidang Pengelolaan Batas Negara, Pengelolaan Infrastruktur dan Potensi Kawasan, Fasilitasi dan Evaluasi Kerjasama;
  - b. Mengumpulkan bahan pengoordinasian perumusan Kebijakan Daerah di bidang Pengelolaan Batas Negara, Pengelolaan Infrastruktur dan Potensi Kawasan, Fasilitasi dan Evaluasi Kerjasama;
  - c. Mengumpulkan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang Pengelolaan Batas Negara, Pengelolaan Infrastruktur dan Potensi Kawasan, Fasilitasi dan Evaluasi Kerjasama;
  - d. Mengumpulkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kebijakan Daerah di bidang Pengelolaan Batas Negara, Pengelolaan Infrastruktur dan Potensi Kawasan, Fasilitasi dan Evaluasi Kerjasama; dan
  - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam pengoordinasian penyusunan Kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, penyusunan Kebijakan Daerah dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kebijakan Daerah di bidang Perekonomian, Administrasi Pembangunan, Pengadaan Barang dan Jasa, dan Perlengkapan.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai fungsi:

- a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang Perekonomian, Administrasi Pembangunan, Pengadaan Barang dan Jasa, dan Perlengkapan;
- b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang Perekonomian, Administrasi Pembangunan, Pengadaan Barang dan Jasa, dan Perlengkapan;
- c. Penyusunan kebijakan daerah di bidang Pengadaan Barang dan Jasa;

- d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pengadaan Barang dan Jasa;
- e. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kebijakan Daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang Perekonomian, Administrasi Pembangunan, Pengadaan Barang dan Jasa, dan Perlengkapan; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah di bidang Perekonomian, Administrasi Pembangunan, Pengadaan Barang dan Jasa, dan Perlengkapan yang berkaitan dengan tugasnya.

Untuk melaksanakan tugasnya, Asisten Perekonomian dan Pembangunan dibantu oleh :

**A. Bagian Perekonomian**

Bagian Perekonomian mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian perumusan Kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kebijakan Daerah di bidang pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Pengendalian dan Distribusi Perekonomian, dan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil.

Bagian Perekonomian mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan Kebijakan Daerah di bidang Pembinaan BUMD dan BLUD, Pengendalian dan Distribusi Perekonomian, dan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil;
- b. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang Pembinaan BUMD dan BLUD, Pengendalian dan Distribusi Perekonomian, dan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil;
- c. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kebijakan Daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang Pembinaan BUMD dan BLUD, Pengendalian dan Distribusi Perekonomian,

- dan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya.

Uraian tugas Bagian Perekonomian sebagai berikut:

1. Mengumpulkan bahan pengoordinasian perumusan Kebijakan Daerah di bidang Pembinaan BUMD dan BLUD, Pengendalian dan Distribusi Perekonomian, dan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil;
2. Mengumpulkan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang Pembinaan BUMD dan BLUD, Pengendalian dan Distribusi Perekonomian, dan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil;
3. Mengumpulkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kebijakan Daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang Pembinaan BUMD dan BLUD, Pengendalian dan Distribusi Perekonomian, dan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil; dan
4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya;

#### B. Bagian Administrasi Pembangunan

Bagian Administrasi Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan Kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kebijakan Daerah di bidang Penyusunan Program, Pengendalian Program, Evaluasi dan Pelaporan Serta Sumber Daya Alam.

Bagian Administrasi Pembangunan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang Penyusunan Program, Pengendalian Program dan Evaluasi dan Pelaporan;
- b. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang Penyusunan Program, Pengendalian Program dan Evaluasi dan Pelaporan;
- c. Penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis dan bahan kebijakan bidang

- Penyusunan Program, Pengendalian Program dan Evaluasi dan Pelaporan;
- d. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Penyusunan Program, Pengendalian Program dan Evaluasi dan Pelaporan;
  - e. Penyiapan pengoordinasian perumusan Kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kebijakan Daerah di Bidang Sumber Daya Alam; dan
  - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya.

Uraian tugas Bagian Administrasi Pembangunan sebagai berikut:

1. Merencanakan dan mengkoordinasikan Penyusunan Program Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun;
2. Melakukan fasilitasi terkait koordinasi dan pengumpulan data usulan Standar Satuan Harga Sekretariat Daerah;
3. Melaksanakan Penyusunan Program, Pengendalian Program dan Evaluasi dan Pelaporan;
4. Melaksanakan dan menyusun petunjuk teknis dan bahan kebijakan Penyusunan Program, Pengendalian Program dan Evaluasi dan Pelaporan;
5. Melaksanakan pengadministrasian Penyusunan Program, Pengendalian Program dan Evaluasi dan Pelaporan;
6. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap Penyusunan Program, Pengendalian Program dan Evaluasi dan Pelaporan;
7. Melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Sumber Daya Alam; dan
8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

#### C. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan Kebijakan Daerah, pengoordinasian perumusan Kebijakan

Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik, Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa.

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyiapan bahan perumusan Kebijakan Daerah di bidang Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik, Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa;
- b. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan Kebijakan Daerah di bidang Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik, Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa;
- c. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik, Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa;
- d. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kebijakan Daerah terkait pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik, Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya.

Uraian tugas Bagian Pengadaan Barang dan Jasa sebagai berikut:

1. Mengumpulkan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik, Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa;
2. Mengumpulkan bahan pengoordinasian perumusan Kebijakan Daerah di bidang pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik, Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa;
3. Mengumpulkan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat

Daerah di bidang pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik, Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa;

4. Mengumpulkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kebijakan Daerah terkait pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik, Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa; dan
5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya.

#### D. Bagian Perlengkapan

Bagian Perlengkapan mempunyai tugas menyusun serta melaksanakan program dan kebijakan teknis operasional dalam rangka pelaksanaan kegiatan dibidang Perbekalan dan Pemeliharaan serta Sarana dan Prasarana Acara.

Bagian Perlengkapan mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan dibidang Perbekalan, Pemeliharaan Serta Sarana dan Prasarana Acara;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dibidang Perbekalan, Pemeliharaan serta Sarana dan Prasarana Acara; dan
- c. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya.

Uraian tugas Bagian Perlengkapan sebagai berikut:

1. Menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan dibidang Perbekalan Kantor, Pemeliharaan dan Sarana dan Prasarana Acara;
2. Melaksanakan pengadaan dan mendistribusikan perbekalan kantor di lingkungan Sekretariat Daerah;
3. Melaksanakan pengelolaan, penggunaan, pengendalian dan pemeliharaan kendaraan dinas operasional dan sewa kendaraan di lingkungan Sekretariat Daerah;
4. Melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana serta menjaga

- kebersihan kantor dan bangunan gedung lainnya yang berada dalam penggunaan Sekretariat Daerah;
5. Melaksanakan penyiapan sarana dan prasarana acara untuk mendukung kegiatan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah serta Sekretariat Daerah; dan
  6. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang ditugaskan oleh pimpinan.

### 3. Asisten Administrasi Umum

Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah, pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Umum dan Kepegawaian, Organisasi, Protokol dan Komunikasi Pimpinan, dan Perencanaan dan Keuangan.

Asisten Administrasi Umum mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan daerah di bidang Organisasi;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Umum dan Kepegawaian, Protokol dan Komunikasi Pimpinan, dan Perencanaan dan Keuangan.
- c. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang Organisasi;
- d. Penyiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang Umum dan Kepegawaian, Organisasi, Protokol dan Komunikasi Pimpinan, dan Perencanaan dan Keuangan;
- e. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kebijakan Daerah di bidang Organisasi;
- f. Penyiapan pelaksanaan pembinaan administrasi dan ASN pada Instansi Daerah; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah di bidang Organisasi, Umum dan Kepegawaian, dan administrasi pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya. Untuk melaksanakan tugasnya, Asisten Administrasi Umum dibantu oleh:

#### A. Bagian Umum dan Kepegawaian

Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan

penyiapan pelaksanaan kebijakan dan pemantauan dan evaluasi di bidang Tata Usaha Pimpinan dan Staf Ahli, Kepegawaian dan Umum.

Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Tata Usaha Pimpinan dan Staf Ahli, Kepegawaian dan Umum;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang Tata Usaha Pimpinan dan Staf Ahli, Kepegawaian dan Umum; dan
- c. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya.

Uraian tugas Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai berikut :

- a. Menyusun dan membuat rencana program di bidang Tata Usaha Pimpinan dan Staf Ahli, Kepegawaian, dan Umum;
- b. Melaksanakan, mengendalikan dan membina penatausahaan umum dan pimpinan yang meliputi penataan dan pendistribusian surat masuk dan surat keluar;
- c. Melaksanakan pelayanan, pembinaan umum dan kepegawaian Sekretariat Daerah;
- d. Melaksanakan pembinaan disiplin pegawai di lingkungan Sekretariat Daerah; dan
- e. Melaksanakan penatausahaan administrasi perjalanan dinas Pimpinan Daerah dan Sekretariat Daerah.

## B. Bagian Organisasi

Bagian Organisasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan Kebijakan Daerah, pengoordinasian perumusan Kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kebijakan Daerah di bidang Kelembagaan dan Analisis Jabatan, Pelayanan Publik dan Tata laksana, Kinerja dan Reformasi Birokrasi.

Bagian Organisasi mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan Kebijakan Daerah di bidang Kelembagaan dan

- Analisis Jabatan, Pelayanan Publik dan Tata laksana serta Kinerja dan Reformasi Birokrasi;
- b. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan Kebijakan Daerah di bidang Kelembagaan dan Analisis Jabatan, Pelayanan Publik dan Tata laksana serta Kinerja dan Reformasi Birokrasi;
  - c. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang Kelembagaan dan Analisis Jabatan, Pelayanan Publik dan Tata laksana serta Kinerja dan Reformasi Birokrasi;
  - d. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kebijakan Daerah di bidang Kelembagaan dan Analisis Jabatan, Pelayanan Publik dan Tata laksana serta Kinerja dan Reformasi Birokrasi; dan
  - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya.

Uraian tugas Bagian Organisasi sebagai berikut :

- a. Melaksanakan penyusunan petunjuk teknis dan perumusan Kebijakan Daerah di bidang Kelembagaan dan Analisis Jabatan, Pelayanan Publik dan Tata laksana serta Kinerja dan Reformasi Birokrasi;
- b. Mengoordinasikan perumusan Kebijakan Daerah di bidang Kelembagaan dan Analisis Jabatan, Pelayanan Publik dan Tata laksana serta Kinerja dan Reformasi Birokrasi;
- c. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang Kelembagaan dan Analisis Jabatan, Pelayanan Publik dan Tata laksana serta Kinerja dan Reformasi Birokrasi;
- d. Melaksanakan penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kebijakan Daerah di bidang Kelembagaan dan Analisis Jabatan, Pelayanan Publik dan Tata laksana serta Kinerja dan Reformasi Birokrasi; dan
- e. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang ditugaskan oleh pimpinan.

### C. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas

Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kebijakan Daerah di bidang Protokol, Dokumentasi dan Komunikasi Pimpinan serta Rumah Tangga Pimpinan.

Bagian Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang protokol, dokumentasi dan komunikasi pimpinan serta rumah tangga pimpinan;
- b. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang Protokol, Dokumentasi dan Komunikasi Pimpinan serta Rumah Tangga Pimpinan;
- c. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kebijakan Daerah terkait Protokol, Dokumentasi dan Komunikasi Pimpinan serta Rumah Tangga Pimpinan; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya.

Uraian tugas Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan sebagai berikut :

1. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Protokol, Dokumentasi dan Komunikasi Pimpinan serta Rumah Tangga Pimpinan;
2. Menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang Protokol, Dokumentasi dan Komunikasi Pimpinan serta Rumah Tangga Pimpinan;
3. Menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait Protokol, Dokumentasi dan Komunikasi Pimpinan serta Rumah Tangga Pimpinan; dan
4. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang ditugaskan oleh pimpinan.

#### D. Bagian Perencanaan dan Keuangan

Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan Kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kebijakan Daerah di bidang Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan di lingkungan Sekretariat

Daerah.

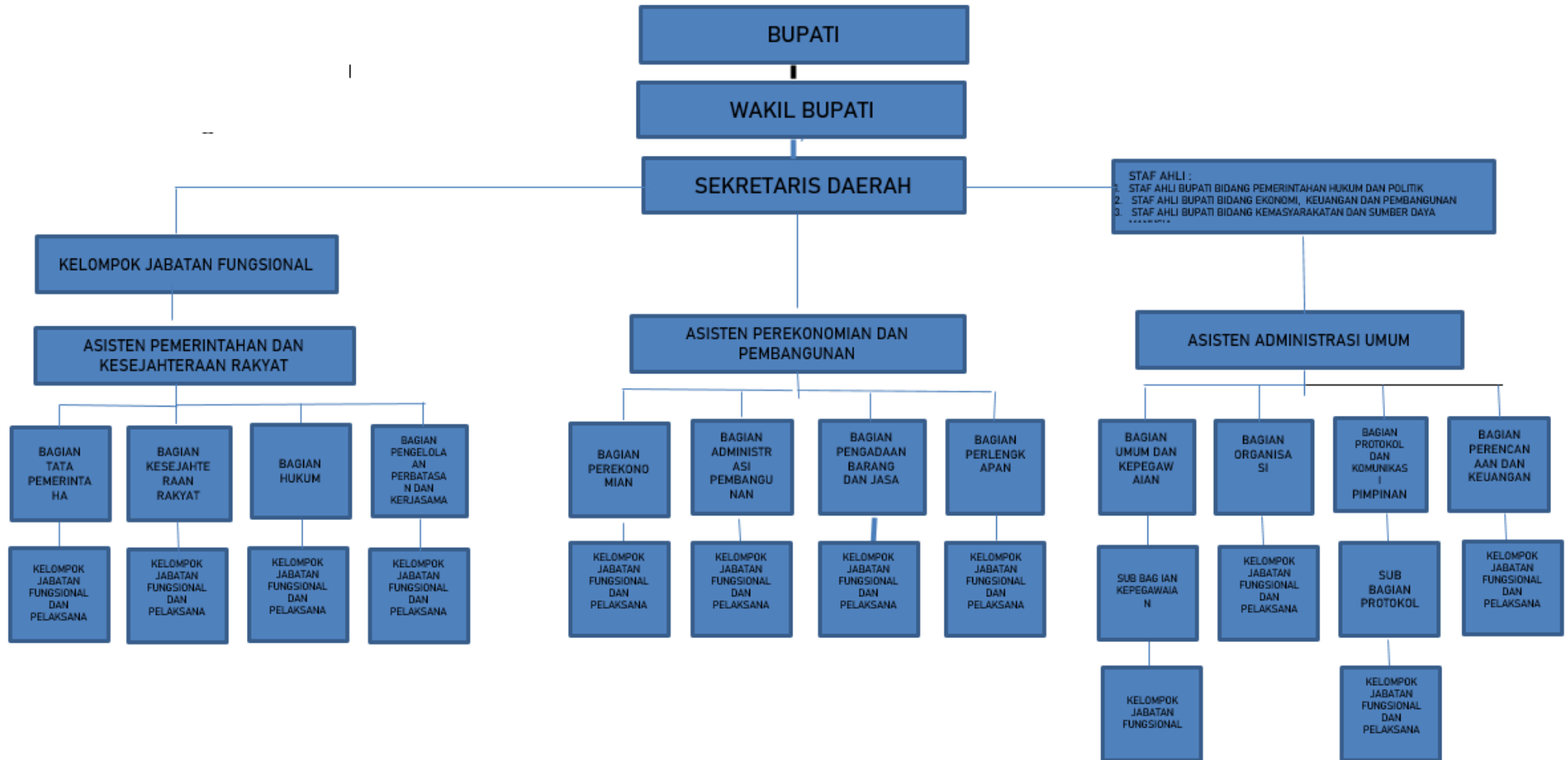
Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan Kebijakan Daerah di bidang Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan di lingkungan Sekretariat Daerah;
- b. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas di bidang Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan di lingkungan Sekretariat Daerah;
- c. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kebijakan Daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan di lingkungan Sekretariat Daerah; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya.

Uraian tugas Bagian Perencanaan dan Keuangan sebagai berikut:

1. Menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan Kebijakan Daerah di bidang Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan di lingkungan Sekretariat Daerah;
2. Menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan di lingkungan Sekretariat Daerah;
3. Menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kebijakan Daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan di lingkungan Sekretariat Daerah; dan
4. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang ditugaskan oleh pimpinan.

Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun  
Peraturan Bupati Karimun Nomor 96 Tahun 2022



### 2.3 Sumber Daya Sekretariat Daerah

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan faktor penting dalam proses pembangunan dan pencapaian tujuan organisasi. Apabila di dalam organisasi sudah memiliki modal besar dan teknologi canggih namun tidak ada SDM yang dapat mengelola dan memanfaatkannya maka tidak akan mungkin dapat meraih keberhasilan dalam mencapai tujuan organisasi. Oleh sebab itu, pentingnya peran SDM dalam organisasi itu sangat diperlukan sebagai unsur utama dan unsur pengendali keberhasilan organisasi. Berdasarkan data kepegawaian s.d. bulan Desember 2024, Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun memiliki pegawai sebanyak 302 orang dengan komposisi 146 PNS, 33 PPPK dan 123 Non ASN. Komposisi tersebut berdasarkan SOTK Sekretariat Daerah pada Tahun 2024. Tabel berikut ini menggambarkan komposisi personil di lingkungan Sekretariat Daerah:

Tabel 2.1.  
Komposisi Personil Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun

No	Unit Kerja	PNS	PPPK	Tenaga Kontrak	Jumlah
1	Sekretaris Daerah	0	0	0	0
2	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	1	0	0	1
3	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	1	0	0	1
4	Asisten Administrasi Umum	1	0	0	1
5	Staf Ahli	3	0	0	3
6	Bagian Tata Pemerintahan	8	2	4	14
7	Bagian Kesejahteraan Rakyat	8	2	21	31
8	Bagian Hukum	13	4	3	20
9	Bagian Pengelolaan Perbatasan dan Kerjasama	9	0	6	15
10	Bagian Perekonomian	9	3	6	18
11	Bagian Adm. Pembangunan	10	4	6	20
12	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	26	2	4	32
13	Bagian Perlengkapan	5	3	12	20

14	Bagian Umum dan Kepegawaian	12	7	30	49
15	Bagian Organisasi	9	2	1	12
16	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	12	1	26	39
17	Bagian Perencanaan dan Keuangan	19	3	4	26
	<b>TOTAL</b>	<b>146</b>	<b>33</b>	<b>123</b>	<b>302</b>

Sumber : Bagian Umum dan Kepegawaian Setda

Secara lengkap gambaran tentang kepegawaian di lingkungan Sekretariat Daerah menurut Status, Pangkat dan Golongan. Komposisi tersebut berdasarkan SOTK Sekretariat Daerah pada Tahun 2024 sebagaimana ditunjukkan pada Tabel sebagai berikut:

**Tabel 2.2**  
**Pegawai Menurut Status, Pangkat dan Golongan**

No	Status Kepegawaian	Gol/ Ruang	Unit Kerja di Lingkungan Sekretariat Daerah															
			Sekretaris	Asisten	Staf Ahli	Tata Pemerintahan	Kesejahteraan Rakyat	Hukum	Pengelola Perbatasan dan Kerjasama	Perekonomian	Adm. pembangunan	Pengadaan Barang dan Jasa	Pertengkapan	Umum dan Kepegawaian	Organisasi	Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Perencanaan dan Keuangan	TOTAL
A	PNS																	
1.	Pembina Utama Madya	IV/d	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Pembina Utama Muda	IV/c	0	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
3.	Pembina Tk. I	IV/b	0	0	1	0	0	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	5
4.	Pembina	IV/a	0	0	0	1	0	0	0	1	1	2	0	0	1	0	1	7
5.	Penata Tk. I	III/d	0	0	0	3	2	2	2	0	2	6	1	2	2	2	0	24
6.	Penata	III/c	0	0	0	1	2	2	1	3	0	4	2	6	2	1	3	27

7.	Penata Muda Tk. I	III/b	0	0	0	0	1	5	0	0	0	3	0	0	0	1	2	12
8.	Penata Muda	III/a	0	0	0	4	1	4	4	4	4	9	1	2	4	6	6	49
9.	Pengatur Tk. I	II/d	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	0	1	1	1	1	8
10.	Pengatur	II/c	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	6	9
11.	Pengatur Muda Tk. I	II/b	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1
12.	Pengatur Muda	II/a	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
13.	Juru Tk. I	I/b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Juru Muda	I/a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Grade	IX	0	0	0	2	2	4	0	3	4	2	1	5	2	1	3	29
16.	Grade	VII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	4
B	Tenaga Kontrak	-	0	0	0	4	21	3	6	6	6	4	12	30	1	26	4	123
	TOTAL		0	3	3	15	31	21	15	18	20	32	20	49	13	38	26	302

Sumber : Bagian Umum dan Kepegawaian Setda

### 2.3.1. Pegawai Menurut Status dan Tingkat Pendidikan

Gambaran secara lengkap tentang pegawai di lingkungan Sekretariat Daerah menurut Latar Belakang Pendidikan. Komposisi tersebut berdasarkan SOTK Sekretariat Daerah pada Tahun 2021 sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut:

**Tabel 2.3.**  
**Pegawai Menurut Status dan Tingkat Pendidikan**

No	Status Kepegawaian	Unit Kerja di Lingkungan Sekretariat Daerah															
		Sekretaris	Asisten	Staf Ahli	Tata Pemerintahan	Kesejahteraan Rakyat	Hukum	Pengelola Perbatasan dan Kerjasama	Perekonomian	Adm. pembangunan	Pengadaan Barang dan Jasa	Pertengkapan	Umum dan Kepegawaian	Organisasi	Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Perencanaan dan Keuangan	TOTAL
A	PNS																
1.	Strata 3	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0		5
2.	Strata 2	0	1	1	0	0	0	2	3	3	0	1	1	0	0	4	22
3.	Strata 1	0	0	0	7	9	18	0	9	5	19	4	13	9	9	8	116
4.	Diploma II/III/IV	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	3	0	1	11	19
5.	SMA/Sederajat	0	0	0	2	1	0	1	1	2	2	1	2	1	3	1	17
6.	SMP/Sederajat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	SD/Sederajat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	Honorar Daerah																
1.	Strata 2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
2.	Strata 1	0	0	0	1	11	1	2	3	3	2	2	11	1	6	1	44
3.	Diploma II/III/IV	0	0	0	0	2	1	6	0	1	1	1	2	1	1	2	18
4.	SMA/Sederajat	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	1	0	1	0	7
5.	SMP/Sederajat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2
6.	SD/Sederajat	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	3	0	5
	TOTAL	0	3	3	8	24	21	11	17	17	27	13	34	13	25	27	123

Sumber : bagian Umum dan Kepegawaian Setda

### 2.3.2. Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun

#### 2.3.2.1. Capaian Kinerja Pelayanan

Kinerja pelayanan PD merupakan capaian Kinerja PD yang diperoleh dari perbandingan antara capaian kinerja pelayanan PD dengan kinerja yang semula

ditargetkan, serta dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut.

Pada rencana strategis periode 2022-2024 memberikan kontribusi yang baik pada peningkatan tata kelola pemerintahan yang menjadi salah satu tujuan pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun. Kontribusi ini tergambar dalam pencapaian kinerja setda yang baik melalui pencapaian Indeks Reformasi Birokrasi dengan proyeksi tahun 2024 terealisasi pada predikat BB (77,85). Dan pencapaian nilai AKIP Setda yang mengalami peningkatan tergambar pencapaian kinerja Sekretariat Daerah baik pada tahun 2023 dengan proyeksi capaian 73,71 (BB).

Sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pasal 1 menyebutkan bahwa Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Dalam penyelenggaraan SAKIP meliputi:

1. Rencana Strategis
2. Perjanjian Kinerja
3. Pengelolaan Data Kinerja
4. Pelaporan Kinerja
5. Reviu dan Evaluasi Kinerja

Capaian kinerja pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2021-2024 tergambar pada tabel 2.4.. dibawah ini :

Tabel 2.4.  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-				Rasio Capaian pada Tahun ke-			
					2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Nilai AKIP Sekretariat Daerah	-	-	-	75,98	76,00	76,15	76,25	70,18	69,12	73,71	na	92,36	90,94	96,79	na
2	Level MR	-	-	-	na	na	na	3	na	na	na	3,13	na	na	na	104
3	Indeks Akuntabilitas	-	-	-	72,50	73,00	73,25	73,50	73,26	73,65	75,43	75,98	101,04	100,89	102,97	103,37
4	Pencapaian Tepra	-	-	-	80%	81%	82%	83%	95,69	93,39	87	97,93	119,61	115,18	108,75	122,41

**Tabel 2.5.**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun**

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke-				Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				Rata-rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Prog. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-	45.119.187.681	327.578.000	45.646.138.731	-	42.661.710.213	201.065.370	39.602.777.169	-	94,55%	61,38	89,55	0,0038	-0,0024
Prog. Pengelolaan Perbatasan	-	948.496.000	401.501.000	176.092.000	-	845.033.250	345.001.600	175.715.900	-	89,09%	85,93	99,79	-0,426	-0,404
Prog. Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	-	38.609.706.364	48.410.819.025	36.789.112.930	-	36.208.040.411	35.454.342.891	33.588.372.330	-	93,78%	73,24	76,06	-0,016	-0,916
Prog. Perekonomian Dan Pembangunan	-	17.548.118.700	6.203.350.898	4.547.574.870	-	13.864.935.186	5.164.181.817	4.481.318.324	-	79,01%	83,24	98,54	-0,360	-0,311

Disamping kinerja pencapaian target pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsinya, juga perlu diukur pencapaian kinerja anggaran. Capaian kinerja pendanaan didasarkan pada alokasi pagu dan realisasi anggaran SETDA Kabupaten Karimun sejak Tahun 2022 sampai dengan tahun 2024.

Tabel 2.5. diatas menunjukkan bahwa realisasi pada SETDA belum cukup baik dalam pencapaian kinerja anggaran. Berdasarkan data yang diuraikan diatas, dapat dihitung bahwa rata-rata anggaran yang direalisasikan adalah sekitar 83,35 %. Seperti yang tersaji tabel 2.5. rincian target dan realisasi anggaran SETDA kabupaten Karimun Tahun 2022 s/d 2024.

### Manajemen Resiko

Manajemen Resiko merupakan proses pengelolaan terhadap resiko mulai dari identifikasi, analisis dan evaluasi resiko, termasuk rencana tindak pengendalian. Manajemen resiko juga merupakan proses sistematis dan terstruktur yang didukung budaya sadar resiko untuk mengelola resiko organisasi pada tingkat yang dapat diterima guna memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian sasaran organisasi.

Tujuan manajemen resiko pada pemerintahan adalah untuk memastikan pencapaian tujuan organisasi, melindungi aset dan reputasi, meningkatkan kualitas layanan publik, serta menjaga keberlanjutan operasional melalui pengelolaan resiko yang sistematis.

Klasifikasi manajemen resiko pada pemerintahan seperti dibawah ini:

1. Manajemen resiko Strategis  
Fokus pada resiko yang mempengaruhi keberhasilan jangka panjang.
2. Manajemen resiko opearsional  
Menangani resiko yang timbul dalam proses, sistem atau kegagalan manusia dalam opearsional sehari-hari.
3. Manajemen resiko finansial  
Meliputi resiko terkait pengelolaan dana, anggaran dan investasi.
4. Manajemen resiko kepatuhan dan hukum  
Berkaitan dengan resiko pelanggaran terhadap hukum, peraturan dan kebijakan, mencakup resiko yang timbul dari ketidakpatuhan terhadap undang-undang,

peraturan atau standar yang berlaku.

#### 5. Manajemen resiko reputasi

Meliputi resiko yang dapat merusak citra dan kredibilitas pemerintahan dimata publik.

Keterkaitan pengelolaan resiko dan manajemen pemerintahan adalah alat fundamental untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good govermance*) dengan cara mengidentifikasi, menganalisis dan mengelola resiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan pemerintahan. Penerapan manajemen resiko di instansi pemerintah diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) untuk meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas pelayanan publik. Hubungan pengelolaan resiko dan manajemen pemerintahan adalah :

1. Mendukung pencapaian tujuan
2. Meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas
3. Menguatkan sistem pengendalian internal
4. Meningkatkan kepercayaan publik.

Pada tahun 2024 hasil yang dicapat SETDA dalam pengukuran Indeks Kematangan Manajemen Resiko SETDA adalah mendapatkan nilai 3.13 yaitu dengan target 3.00 sehingga rasio capaian yaitu sebesar 104 % sesuai dengan tabel 2.4. diatas.

#### 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan masyarakat secara keseluruhan, yaitu suatu upaya adanya perubahan secara terencana, bertahap, terarah dan berkesinambungan dari suatu bentuk untuk mencapai tatanan kehidupan yang lebih baik mencakup perubahan perbaikan masyarakat pada dimensi sosial budaya, ekonomi, politik, ideologi serta bersifat komprehensif bagi masyarakat.

Dalam upaya mengoptimalkan daya guna dan hasil guna suatu pelayanan dan pemabngunan, Sekretariat Daerah Kabupaten Karimunmemilih peran strategis untuk menjawab tantangan perkembangan masyarakat dinamis yang terus berkembang

dalam meningkatkan kinerja pelayanan pembangunan sebagai lembaga pemerintah yang baik.

Keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi bergantung pada kemampuan manajerial dalam membawa lembaga/organisasi untuk melakukan adaptasi dengan kondisi lingkungan yang senantiasa berubah secara dinamis. Oleh karena itu, analisis terhadap lingkungan merupakan hal yang harus dilakukan, yaitu dengan melakukan analisis organisasi terhadap lingkungan strategis baik dari lingkungan internal maupun eksternal.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun menghadapi berbagai tantangan maupun peluang baik dari dalam organisasi maupun luar organisasi untuk dapat melaksanakan pengembangan pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun. Untuk itu terdapat pengaruh lingkungan strategis yang dapat dijelaskan baik secara internal maupun eksternal sebagai berikut :

*Internal (Kelemahan)*

- a. Masih rendahnya budaya kerja dan disiplin ASN pada masing-masing bagian.
- b. Belum kompetitifnya sumberdaya ASN dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi pada masing-masing bagian, sehingga menyebabkan belum tertanganinya beban kerja dengan cepat dan akurat.
- c. Belum semua SOPD, termasuk bagian-bagian lingkup Sekretariat Daerah belum memiliki SOP.
- d. Masih belum memadainya sarana dan prasarana dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi seluruh bagian

*Internal (Kekuatan)*

- a. Adanya Kepemimpinan Sekretaris Daerah yang kuat untuk melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintah daerah.
- b. Organisasi yang memiliki ukuran yang tepat.
- c. Adanya koordinasi dan kerjasama antara bagian di lingkungan sekretariat daerah.

*Eksternal (Potensi)*

- a. Adanya Peraturan Perundang-undangan yang mendukung pelaksanaan tugas

pokok dan fungsi Sekretariat Daerah.

- b. Adanya koordinasi dan kerjasama antar instansi OPD di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Instansi di luar pemerintah Daerah.
- c. Adanya dukungan teknologi informatika dan komputer untuk peningkatan kinerja pelayanan penyelenggaraan pemerintah daerah.

*Eksternal* (Tantangan)

- a. Tuntutan transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan akuntabilitas kinerja dari masyarakat.
- b. Masih adanya potensi pelanggaran dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang mengarah kepada indikasi korupsi, kolusi dan nepotisme.

Tantangan dan peluang dalam pengembangan pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun juga sangat dipengaruhi oleh beberapa perubahan lingkungan strategis internal maupun eksternal dalam skala regional dan nasional. Perubahan – perubahan lingkungan strategis internal maupun eksternal dalam skala regional dan nasional tersebut saling terkait memberikan pengaruh terhadap rencana strategis dan orientasi pembangunan Daerah Tahun 2025-2029.

- a. Tantangan Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun
  - 1) Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah berupa peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Kewilayahan;
  - 2) Harmonisasi dan sinkronisasi dalam rangka penyusunan produk hukum daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kebutuhan masyarakat dan penyelenggara pemerintah daerah serta fasilitasi terhadap rancangan produk hukum;
  - 3) Meningkatkan efektivitas penyelenggaraan kerjasama daerah;
  - 4) Meningkatkan pengendalian pembangunan dan pengembangan manusia yang berdaya saing, perekonomian yang kokoh serta kokohnya interaksi sosial dan kemasyarakatan, meningkatkan pengendalian program, kebijakan pembiayaan pembangunan serta mengembangkan ekonomi kreatif.

- 5) Fasilitasi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan BUMD.
  - 6) Manajemen pengelolaan kinerja organisasi dan kinerja ASN di Lingkup Sekretariat daerah.
  - 7) Peningkatan sarana dan prasarana dan pelayanan umum sekretariat daerah kabupaten karimun.
- b. Peluang pengembangan pelayanan Sekretariat daerah Kabupaten Karimun.
- 1) Melakukan peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih baik dan lebih terbuka;
  - 2) Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur di Lingkungan Sekretariat daerah.
  - 3) Tercapainya pelayanan kerumahtanggaan dan keprotokolan yang cepat, lancar dan bertanggungjawab;
  - 4) Pengembangan dan pendayagunaan Sistem Aplikasi Pengadaan Barang dan Jasa secara elektronik.
  - 5) Dukungan kebijakan dan anggaran dari kepala daerah dalam rangka peningkatan kinerja sekretariat daerah.

## 2.5 Kelompok Sasaran Layanan

Secara sederhana stakeholder adalah semua pihak baik itu individu, komunitas atau kelompok masyarakat yang memiliki hubungan dan kepentingan terhadap organisasi, perusahaan dan permasalahan yang sedang dibahas, dalam terjemahan bahasa indonesia sendiri arti stakeholder adalah seorang pemangku kepentingan atau pihak yang berkepentingan. Mengacu kepada tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun, berikut ini adalah kelompok sasaran layanan Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun :

Tabel 2.6.  
Kelompok Sasaran Layanan Setda

No	Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah	Uraian Pelayanan	Kelompok Sasaran Layanan
1	Perumusan Kebijakan Daerah	Kebijakan Bidang Bina Mental Spritual	Lembaga dan Organisasi Masyarakat Keagamaan
		Kebijakan Bidang Pembinaan BUMD	Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Karimun
2	Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan	Fasilitasi Pengembangan Organisasi	Perangkat Daerah
		Fasilitasi Kerjasama Daerah	Perangkat Daerah
		Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum daerah	Perangkat Daerah,
		Fasilitasi Penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Perangkat Daerah
3	Pelayanan Internal	Fasilitasi dan Pelayanan Administrasi Pimpinan	KDH/WKDH dan Sekretaris Daerah
		Fasilitasi Urusan Bidang Umum	Internal Sekretariat Daerah

Kelompok sasaran atau penerima manfaat atas program-program yang dilaksanakan Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun secara langsung adalah Internal Sekretariat Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah, Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Karimun dan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Keagamaan.

## 2.6. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Berdasarkan analisis gambaran pelayanan, kajian hasil evaluasi serta kajian terhadap pencapaian kinerja Renstra Sekretariat Daerah, maka dapat dirumuskan isu-isu strategis yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah.

Perumusan isu-isu strategis penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah tahun sebelumnya, serta capaian kinerja rencana strategis Sekretariat Daerah. Isu-isu ini harus mendapat perhatian atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan dimasa yang akan datang.

### 2.6.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Sekretariat Daerah

Dalam perumusan kebijakan publik, hal penting yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah identifikasi permasalahan kebijakan (policy problem) sebagai salah satu tahap dalam perumusan isu strategis daerah. Suatu analisis permasalahan pembangunan harus menemukan permasalahan utama yang dihadapi oleh daerah dengan pendalaman akar masing-masing masalah. Adapun dinamika lingkungan eksternal yang kemungkinan besar terjadi di masa datang, baik yang memberi peluang atau sebaliknya berdampak ancaman bagi masyarakat, harus dikenali dengan baik sebagai bagian dari identifikasi isu-isu strategis pembangunan daerah. Permasalahan pembangunan daerah merupakan "gap expectation" antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat ini. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan serta ancaman yang tidak diantisipasi.

Tabel 2.7.  
Identifikasi Permasalahan Pelayanan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

NO	URUSAN / MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1.	Permasalahan pada Bagian Tata Pemerintahan	Kurang Optimalnya administrasi dan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah.	*Keterbatasan SDM dan sarana prasarana penunjang dalam kegiatan
		Belum Optimalnya Pengumpulan dan penelaahan Nama Rupa Bumi.	Kurangnya keterlibatan institusi berwenang dalam penentuan batas wilayah secara teknologi dan tenaga ahli sehingga perlu dukungan anggaran
		Masih rendahnya respon perangkat daerah terhadap LPPD, SPM dan LKPJ sehingga belum sinergis antara kepala bagian penyedia data dengan kasubbag penyusun laporan.	Belum Optimalnya pelayanan publik di kecamatan.
		Peningkatan Pelayanan Publik di Kecamatan.	
2.	Permasalahan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat	Belum optimalnya koordinasi di bidang kesejahteraan rakyat.	Masih adanya ego sektoral dan kurangnya komunikasi. Jenis pendidikan tidak linear.
		Masih belum adanya sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi.	
3.	Permasalahan pada Bagian Hukum	Belum tercapainya target program pembentukan perda sesuai dengan yang ditetapkan.	Belum semua OPD menganggarkan untuk fasilitasi penyusunan perda.
		Masih kurangnya dukungan data.	Kurangnya kompetensi SDM penyusun Perundang-undangan.
4.	Permasalahan pada Bagian Perbatasan dan Kerjasama	Kurangnya pemeliharaan batas wilayah daerah Kabupaten Karimun.	Keterbatasan sarana prasarana penunjang dalam kegiatan.
		Rendahnya respon perangkat daerah terkait potensi kerjasama daerah yang bisa ditindaklanjuti.	Kurangnya kegiatan workshop yang mendekatkan OPD dengan pihak ketiga yang mampu memfasilitasi kebutuhan pembangunan

		Kurangnya sumber daya aparatur yang memenuhi.	Kurangnya kompetensi SDM dalam mengelola kerjasama.
5.	Permasalahan pada Bagian Perekonomian	Masih rendahnya dukungan data terkait dengan evaluasi kinerja BUMD.	Data Dukung dari BUMD masih kurang.
		Masih belum adanya sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi analisis ekonomi daerah.	Kurangnya kompetensi SDM dalam hal penyusunan kebijakan dan analisis data laporan.
6.	Permasalahan pada Bagian Administrasi Pemangundan dan SDA	Masih rendahnya dukungan data pelaksanaan pembangunan dari perangkat daerah.	Belum adanya monev dilakukan secara digital.
		Belum optimalnya aplikasi dan implementasinya.	Kurangnya Kompetensi SDM.
		Perlunya peningkatan kinerja pengendalian pembangunan.	
		Perlunya peningkatan sumber daya aparatur yang memenuhi.	
7.	Permasalahan pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Belum terpenuhinya sarana dan prasarana yang diperlukan.	Keterbatasan sumber dana dalam penganggaran.
		Terbatasnya anggaran untuk peningkatan kompetensi SDM UKPBJ.	
8.	Permasalahan pada Bagian Perlengkapan	Belum terpenuhinya sarana dan prasana yang diperlukan dalam pemeliharaan gedung, asrama dan lain-lain yang menjadi aset Setda.	Keterbatasan sumber dana dalam penganggaran
9.	Permasalahan pada Bagian Perencanaan dan Keuangan	Masih adanya keterlambatan pelaporan kinerja Setda.	Lambatnya pengumpulan data untuk bahan laporan. Perlu peningkatan kompetensi SDM keuangan.
		Masih rendahnya kualitas kompetensi pengelola keuangan dilingkungan Setda.	
10.	Permasalahan pada Bagian Umum dan Kepegawaian	Tingkat responsif dan kualitas pelayanan yang masih belum Optimal.	Adanya perbedaan pandangan dari beberapa anggota dalam penyusunan dan penerapan SOP pada unit kerja.

		Penataan arsip secara elektronik masih belum optimal.	Perlu peningkatan kompetensi SDM arsiparis.
11.	Permasalahan pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Tingkat pelayanan publikasi pimpinan daerah yang belum optimal.	Perlu adanya peningkatan kompetensi SDM.
		Masih lemahnya koordinasi penyelenggaraan protokoler daerah.	
12.	Permasalahan pada Bagian Organisasi	Belum optimalnya perangkat daerah dalam penerapan SOP dan standar pelayanan.	Adanya perbedaan pandangan dari beberapa anggota dalam penyusunan serta penerapan SOP dalam unit kerja.
		Masih rendahnya respon dan pemahaman perangkat daerah terhadap dukungan data penyusunan LkjIP.	Perlu adanya peningkatan kompetensi sumber daya aparatur jabatan analisis kebijakan.

## 2.7 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Terpilih.

Visi amatlah penting dalam suatu kebijakan pembangunan mengingat visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Dengan adanya visi maka segala sumber daya dapat digunakan secara terarah guna mewujudkan kondisi akhir secara terarah guna mewujudkan kondisi akhir yang dicita-citakan melalui serangkaian tahapan perjalanan. Oleh karena itu, visi pembangunan mempunyai berbagai fungsi antara lain:

- a. Sebagai arah bagi semua kebijakan pembangunan;
- b. Sebagai tujuan dan sasaran akhir yang hendak dicapai oleh kebijakan pembangunan;
- c. Sebagai acuan dalam penyusunan program dan anggaran pembangunan;
- d. Sebagai sarana untuk melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap semua kebijakan pembangunan.

Lebih jauh, visi pembangunan dapat menjadi pranata yang berfungsi sebagai pedoman perilaku pembangunan, sebagai alat pemersatu masyarakat dalam

pembangunan dan sebagai sarana pengendali sosial dalam pembangunan. Jadi penentuan visi pembangunan dengan misi dan strategi pencapaiannya amat penting agar proses pembangunan dapat dilaksanakan dengan arah dan kebijakan yang jelas.

Berdasarkan pemahaman atas isu strategis pembangunan yang potensial dihadapi pada periode 2022–2026, arahan dari RPJPD Kabupaten Karimun 2006–2025, serta arahan dari visi dan misi RPJMN 2021–2026 maka visi pembangunan daerah Kabupaten Karimun Tahun 2025–2029 adalah: *“TERWUJUDNYA KARIMUN YANG MAJU, SEJAHTERA DAN BERBUDAYA”*.

Makna dari visi Pemerintah Kabupaten Karimun dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### MAJU

Maju memiliki arti :

Mengandung Makna Kondisi Pembangunan daerah yang dilandasi Keinginan Bersama Untuk Mewujudkan Masa Depan Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan Fisik yang Lebih Baik, didukung Sumber daya Manusia yang Unggul, Profesional, Berperadaban Tinggi, Berdaya Saing, Berakhlak Mulia Serta Berwawasan ke Depan) Maju, diartikan sebagai sebuah proses pembangunan yang berkemajuan dan merupakan tujuan yang harus di capai demi masyarakat Kabupaten Karimun yang sejahtera, adil dan Makmur Tingkat Kemajuan Sebuah Daerah di Ukur Dengan, Pertumbuhan Ekonomi, PDRB Per Kapita dan Indeks Gini.

#### SEJAHTERA

Sejahtera memiliki arti :

Mengandung Makna Dalam Waktu Lebih Kurang Lima Tahun ke Depan Akan Terjadi Semakin Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat, yang Diindikasikan Dengan Meningkatnya Pendapatan Perkapita Penduduk yang Berdampak Keterjangkauan Pelayanan Masyarakat Dalam Memenuhi Kebutuhan Dasar. Sejahtera, di artikan sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Kesejahteraan di tandai dengan peningkatan kualitas SDM, dan berkurangnya kemiskinan yang di ukur dengan Indeks

Pembangunan Manusia dan Prosentase Penduduk Miskin.

## BERBUDAYA

Berbudaya memiliki arti :

Mengandung Makna Kondisi Kehidupan Masyarakat Berbangsa Dan Bernegara yang Bertumpu Pada Nilai-Nilai Budi Pekerti dan Budaya yang Luhur, Mengedepankan Etika, Moral, Maupun Norma Agama Masyarakat yang Peduli Terhadap Kelestarian Kultur Budaya Lokal. Berbudaya, berarti sebagai suatu kondisi yang mencerminkan sikap, tingkah laku, Tindakan, etika, moral, dan budi pekerti individu maupun masyarakat Kabupaten Karimun berdasarkan pada nilai-nilai budaya luhur dan keagamaan yang bersumber pada nilai-nilai budaya melayu dan melekat dalam kehidupan masyarakat Berbudaya di tandai dengan Peningkatan Indeks Pembangunan Kebudayaan melalui meningkatnya Benda Bangunan Struktur situs dan kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan dan Warisan Budaya tak benda yang telah di tetapkan.

Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Kabupaten Karimun 2025-2029 tersebut, maka ditempuh melalui 4 (empat) misi pembangunan sebagai berikut:

1. Membangun Sumber Daya Manusia yang unggul dan Berdaya Saing. Misi ini bertujuan untuk mengembangkan masyarakat yang kuat, kompetitif, dan berbudaya, berlandaskan iman dan takwa. Serta peningkatan kualitas masyarakat agar lebih kompetitif di berbagai sektor, baik lokal, nasional, maupun internasional.
2. Membangun Infrastruktur dan Konektifitas Antar Wilayah Bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Karimun. Pembangunan dan peningkatan jalan, jembatan, dan pelabuhan guna memperlancar mobilitas barang dan manusia. Peningkatan sarana transportasi darat dan laut untuk mendukung konektivitas antar-pulau. Menghubungkan pulau-pulau di Kabupaten Karimun melalui jalur laut dengan peningkatan dermaga dan kapal penyeberangan. Meningkatkan kualitas dan kapasitas jaringan telekomunikasi dan internet, khususnya di daerah terpencil, untuk mendukung transformasi digital dan pemerataan informasi.

- Mengembangkan sistem transportasi publik agar lebih efisien dan terjangkau.
3. Menciptakan Pembangunan Sektor Ekonomi Melalui Penguatan Unggulan Daerah yang Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan. Misi ini menekankan pentingnya pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Karimun sebagai salah satu fokus utama pemerintah daerah. Pembangunan ekonomi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, membuka peluang kerja, serta meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Kabupaten Karimun memiliki potensi ekonomi yang cukup besar, terutama dalam sektor industri, perdagangan, pariwisata, dan perikanan. Dengan mengembangkan sektor-sektor ini, pemerintah berharap dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi dan mengurangi ketimpangan sosial. Penguatan unggulan daerah berarti memaksimalkan potensi sumber daya yang khas dan strategis di Kabupaten Karimun.
  4. Seperti Industri Maritim & Perkapalan: Sebagai daerah kepulauan, Karimun memiliki sektor maritim yang kuat, termasuk galangan kapal dan jasa perbaikan kapal, Perdagangan dan Pelabuhan: Kabupaten Karimun memiliki kawasan perdagangan bebas (FTZ – Free Trade Zone) yang menarik investasi, Pariwisata Bahari: Keindahan pantai dan pulau-pulau di Karimun dapat dikembangkan menjadi destinasi wisata unggulan yang menarik wisatawan domestik maupun internasional, Pertanian dan Perikanan: Pemanfaatan sumber daya laut dan hasil pertanian yang berkelanjutan dapat mendukung ketahanan pangan dan ekonomi lokal. Misi ini juga mengacu pada prinsip pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development), yang berarti pembangunan ekonomi harus dilakukan dengan tetap mempertimbangkan keseimbangan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Keberlanjutan ekonomi: Menjamin bahwa pertumbuhan ekonomi dapat terus berlangsung dalam jangka panjang tanpa merugikan generasi mendatang. Keberlanjutan sosial: Memastikan bahwa pembangunan ekonomi memberikan manfaat yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan. Keberlanjutan lingkungan: Mengurangi dampak negatif terhadap ekosistem dan menjaga sumber daya alam agar tetap terjaga untuk masa depan. Berwawasan Lingkungan Selain berkelanjutan,

pembangunan ekonomi juga harus berwawasan lingkungan, artinya pembangunan tidak boleh mengorbankan kelestarian alam. Kabupaten Karimun sebagai daerah kepulauan memiliki ekosistem laut yang rentan terhadap kerusakan akibat eksploitasi berlebihan.

b. Penentuan Isu – Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Suatu kondisi/hal dikatakan termasuk isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, maka akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, apabila tidak dimanfaatkan, maka akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Beberapa karakteristik lain suatu isu strategis adalah kondisi/hal tersebut bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan / keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang.

Berdasarkan hasil pembobotan terhadap isu-isu yang ditemui di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun, disimpulkan Isu-Isu Strategis Tahun 2022-2026 adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi Pelaporan Tata Kelola Pemerintahan;
2. Akuntabilitas Kinerja;
3. Optimalisasi Kerja Sama Daerah;
4. Transparansi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
5. Optimalisasi Pelaporan Pembangunan;
6. Optimalisasi Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian;
7. Optimalisasi Pelaporan Kinerja Setda;
8. Kebijakan Pengelolaan BUMD.

Untuk menjawab permasalahan tersebut di atas guna mewujudkan pembangunan yang sesuai dengan sasaran misi RPJMD, Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun diharapkan responsif, kreatif dan inovatif agar mampu mengatasi

dan tantangan untuk mewujudkan pelayanan fasilitasi dan koordinasi dalam menghasilkan rumusan kebijakan umum yang berkualitas dan akuntabel. Sehingga diperlukan keterlibatan pelaku pembangunan secara partisipatif melalui peningkatan kualitas peningkatan kapasitas SDM seluruh Bagian lingkup Sekretariat Daerah, pemantapan kelembagaan bagian ditunjang oleh sarana dan prasarana kerja yang berkontribusi secara optimal dalam membangun etos kerja yang prima, serta koordinasi dan komunikasi antar pemangku kepentingan.

## BAB III

### TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

#### 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah

Tujuan merupakan suatu target yang ditetapkan dan hendak dicapai oleh organisasi dalam kurun waktu 1 (satu) hingga 5 (lima) tahun. Dalam hal ini tujuan Sekretariat Daerah adalah :

*“Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel dan Melayani”*

Sekretariat Daerah sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan tugas melakukan Pelayanan Publik, Penyelenggaraan Pemerintahan, Administrasi, Organisasi dan Tata Laksana serta memberikan Pelayanan Administratif kepada seluruh Perangkat Daerah, bertujuan untuk meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*) sehingga dapat mendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi atau kelompok sasaran yang dilayani.

Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Karimun sehingga perumusan tujuan dan sasaran Renstra Sekretariat Daerah tidak boleh bertentangan dengan RPJMD Kabupaten Karimun dan harus mendukung tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Karimun Tahun 2025-2029.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun mendukung Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Karimun yakni Misi ke-4 RPJMD Kabupaten Karimun Tahun 2025-2029 yaitu *Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Iman dan Taqwa*.

Berdasarkan Misi Kabupaten Karimun yang didukung pencapaiannya oleh Sekretariat

Daerah, maka sasaran yang ingin dicapai oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Kesejahteraan Rakyat;
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Setda

Adapun penjabaran Tujuan dan Sasaran beserta Indikator Kinerja yang ingin dicapai oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun disampaikan melalui Tabel berikut:

**Tabel 3.1**  
**Rumusan Tujuan dan Sasaran**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Terwujudnya Pemerintahan yang bersih, Akuntabel dan Melayani	Mewujudkan Pemerintahan yang bersih, Akuntabel dan Melayani	Meningkatkan Kualitas Layanan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Kesejahteraan Rakyat	Indeks Reformasi Hukum	65	70	75	80	85	90	
		Meningkatkan Kualitas Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan	Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)	4,52	4,55	4,58	4,61	4,64	4,66	
			Return Of Asset (ROA)	18	18,50	19	19,60	20	20,50	
			Nilai Kematangan Manajemen Resiko SETDA	4.00	4.10	4.20	4,30	4,40	4,50	
		Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Setda	Nilai AKIP SETDA	74.00	74.20	74.40	74.60	74.80	75.00	

## 3.2 Strategi dan Arah Kebijakan

### 3.2.1. Strategi

Strategi dan kebijakan dalam Renstra PD adalah strategi dan kebijakan PD untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah PD yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah PD, dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi PD. Strategi dan kebijakan dalam Renstra PD selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan PD bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi PD.

Strategi adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan Langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran dengan efektif dan efisien. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Menurut Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 , Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah ( *strategy focussed-management* ).

Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Rumusan strategi juga harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana Pemerintah Daerah menciptakan nilai tambah ( *value added* ) bagi stakeholder pembangunan daerah. Di sini penting untuk mendapatkan parameter utama yang menunjukkan bagaimana strategis tersebut menciptakan nilai ( *strategic objective* ). Berkenaan dengan hal tersebut di atas, maka strategi pembangunan Sekretariat daerah Kabupaten Karimun tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut.

Misi : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Iman dan Taqwa

Strategi yang akan dilakukan Setda Kabupaten Karimun untuk mencapai

tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan Kebijakan Pemerintahan Umum;
2. Mengoptimalkan Kebijakan Pengelolaan Perbatasan;
3. Mengoptimalkan Kebijakan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
4. Mengoptimalkan Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan.

### 3.2.2. Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, arah kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi organisasi perangkat daerah.

Arah kebijakan yang diambil oleh Sekretariat Daerah untuk menjabarkan strategi yang ditetapkan adalah:

1. Meningkatkan Kebijakan Bidang Kelembagaan dan Analisa Jabatan, Pelayanan Publik dan Tata Laksana, serta Bidang Kinerja dan Reformasi Birokrasi;
2. Meningkatkan Kebijakan Bidang Keprotokolan;
3. Meningkatkan Kebijakan Bidang Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian, Perlengkapan dan Rumah Tangga;
4. Meningkatkan Kebijakan Bidang Pemeliharaan dan Pengadaan Barang Milik Daerah;
5. Meningkatkan Nilai Sakip Perangkat Daerah;
6. Meningkatkan Pembangunan Kawasan Perbatasan yang dikoordinasikan melalui Dana APBN;
7. Meningkatkan Kebijakan Bidang Administrasi Pemerintahan, Administrasi Kewilayahan dan Otonomi;
8. Meningkatkan Kebijakan Bidang Bina Mental dan Spiritual, Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat;
9. Meningkatkan Kebijakan Bidang Perundang-Undangan, Bantuan Hukum, Dokumentasi dan Informasi;

10. Meningkatkan Kebijakan Bidang Kerja Sama Daerah;
11. Meningkatkan Kebijakan Bidang Pembinaan BUMD dan BLUD, Perekonomian dan SDA;
12. Meningkatkan Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah;
13. Meningkatkan Kebijakan Bidang Penyusunan Program, Pengendalian dan Evaluasi Program;
14. Meningkatkan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam.

Adapun untuk merumuskan arah kebijakan Renstra Sekretariat Daerah dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 3.2.  
ARAH KEBIJAKAN RENSTRA

No	Tujuan	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra	Ket
1	2	3	4	5
1	Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel dan Melayani	Peningkatan Kualitas Tata Kelola dan Inovasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kebijakan Bidang Kelembagaan dan Analisa Jabatan, Pelayanan Publik dan Tata Laksana, Serta Bidang Kinerja dan Reformasi Birokrasi	
			Meningkatkan Kebijakan Bidang Keprotokolan	
			Meningkatkan Kebijakan Bidang Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian, Perlengkapan dan Rumah Tangga	
			Meningkatkan Kebijakan Bidang Pemeliharaan dan Pengadaan Barang Milik Daerah	
			Meningkatkan Pembangunan Kawasan Perbatasan yang dikoordinasikan melalui Dana APBN	
		Perbaiki proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan palaporan kinerja yang selaras dengan indikator LPPD, penguatan sistem pengendalian internal	Meningkatkan Nilai Akip Sekretariat Daerah	
			Meningkatkan Kebijakan Bidang Administrasi Pemerintahan, Administrasi Kewilayahan dan Otonomi	
			Meningkatkan Kebijakan Bidang Bina Mental dan Spiritual, Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat	

			Meningkatkan Kebijakan Bidang Perundang- Undangan, Bantuan Hukum, Dokumentasi dan Informasi	
			Meningkatkan Kebijakan Bidang Kerja Sama Daerah	
			Meningkatkan Kebijakan Bidang Pembinaan BUMD dan BLUD, Perekonomian dan SDA	
			Meningkatkan Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	
			Meningkatkan Kebijakan Bidang Penyusunan Program, Pengendalian dan Evaluasi Program	
			Meningkatkan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	

## BAB IV

### PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Sedangkan kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program. Selanjutnya sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, terdapat pula sub kegiatan yang merupakan bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah dengan sasaran dan indikator sebagaimana ditetapkan dalam Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021. Berdasarkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Sekretariat Daerah sebagaimana telah dijelaskan dalam bab sebelumnya, diperlukan rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan serta pendanaan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah tersebut. Rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan setda disusun berdasarkan ketentuan dan aturan yang tertuang di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-1-2850 Tahun 2025 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Untuk periode Tahun 2025-2029, setda merencanakan 4 program, 23 kegiatan, dan 84 sub kegiatan dengan anggaran secara berturut-turut sebesar Rp.67.397.754.498.-, Rp.68.431.845.373.-, Rp.69.484.769.217.-, Rp.70.391.606.00.- dan Rp.71.430.328.173.-.

Program dan kegiatan merupakan upaya dari tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang akan dilakukan SETDA. Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terintegrasi yang dilaksanakan oleh organisasi guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui kebijakan organisasi, kebijakan organisasi tersebut kemudian dituangkan dalam bentuk program yang terangkum dalam uraian sebagai berikut:

1. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;

2. Program Perekonomian dan Pembangunan.
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Program Pengelolaan Perbatasan;

#### 4.1 Uraian Kegiatan

Untuk mensukseskan program yang ada di atas, Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun memiliki Kegiatan yang tercantum di bawah ini:

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
9. Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
10. Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah;
11. Penataan Organisasi;
12. Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan;
13. Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama;
14. Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan;
15. Monitoring dan Evaluasi Kewilayahan Perbatasan;
16. Administrasi Tata Pemerintahan;
17. Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat;
18. Fasilitasi dan Koordinasi Hukum;
19. Fasilitasi Kerja Sama Daerah;
20. Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian;
21. Pelaksanaan Administrasi Pembangunan;
22. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa;
23. Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam.

#### 4.2 Uraian Sub Kegiatan

Untuk mensukseskan kegiatan di atas, Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun memiliki Sub Kegiatan yang tercantum di bawah ini:

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
4. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
5. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
6. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
7. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;
8. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
9. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD;
10. Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD;
11. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD;
12. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD;
13. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD;
14. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya;
15. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian;
16. Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai;
17. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi;
18. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan;
19. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
20. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
21. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
22. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
23. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
24. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
25. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
26. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
27. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;

28. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
29. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;
30. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
31. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
32. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
33. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
34. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
35. Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
36. Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
37. Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
38. Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
39. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah;
40. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah;
41. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah;
42. Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
43. Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana;
44. Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi;
45. Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana;
46. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah;
47. Fasilitasi Keprotokolan;
48. Fasilitasi Komunikasi Pimpinan;
49. Pendokumentasian Tugas Pimpinan;
50. Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah;
51. Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan;
52. Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan;
53. Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan;
54. Penjagaan dan Pemeliharaan Tanda Batas Wilayah Negara;

55. Penjagaan dan Pemeliharaan Tanda Batas Daerah;
56. Koordinasi Pelaksanaan Tugas Pembangunan Kawasan Perbatasan di Wilayah Kabupaten/Kota;
57. Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan;
58. Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan;
59. Pengelolaan Administrasi Kewilayahan;
60. Penataan Administrasi Pemerintahan;
61. Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah;
62. Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spritual;
63. Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat;
64. Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial;
65. Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat;
66. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah;
67. Fasilitasi Bantuan Hukum;
68. Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum;
69. Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri;
70. Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri;
71. Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama;
72. Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD;
73. Pengendalian dan Distribusi Perekonomian;
74. Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil;
75. Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD;
76. Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan;
77. Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan;
78. Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan;
79. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa;
80. Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik;

81. Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa;
82. Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan;
83. Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup;
84. Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air.

Tabel 4.1  
Teknik Merumuskan Program, Kegiatan dan Subkegiatan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CATATAN
Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel dan Melayani							
	Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel dan Melayani				Nilai SAKIP		
					Nilai Maturitas SPIP		
					Indeks Pelayanan Publik (IPP)		
		Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Kesejahteraan Rakyat			Indeks Reformasi Hukum		
			Meningkatkan Kualitas Kebijakan Perintah dan Kesejahteraan Rakyat		Nilai Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
					Persentase Kelulusan Santri		
			Terimplementasinya Penyelenggaraan Tata Pemerintah secara Optimal		Persentase LPPD OPD yang Bernilai Tinggi	Administrasi Tata Pemerintahan	
					Persentase Indikator SPM yang Mencapai Target		
			Optimalnya Titik Wilayah Pemekaran Administrasi		Persentase Penegasan Batas Daerah, Kecamatan dan Kelurahan		
				Terlaksananya Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Penataan Administrasi Pemerintahan	
				Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CATATAN
				Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	
			Mewujudkan Kerukunan dan Harmonisasi Umat Beragama		Cakupan Lembaga Keagamaan Tokoh Keagamaan dan Masyarakat yang diberikan Layanan sesuai Kebutuhan	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan	Jumlah Kegiatan Keagamaan yang difasilitasi Pemerintah Daerah	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spritual	
				Tepatnya Sasaran Pemberian Bantuan Sosial dan Bantuan Hibah	Tepatnya Sasaran Pemberian Bantuan Sosial dan Bantuan Hibah	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	
				Terselenggaranya Sosialisasi kepada Pelajar, Masyarakat, Perangkat Desa dan Lembaga Keagamaan	Jumlah Kegiatan Sosialisasi yang dilaksanakan / diselenggarakan	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	
				Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CATATAN
			Meningkatkan Kualitas Produk Hukum Daerah yang Sesuai dengan Kebutuhan Masyarakat dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		Persentase Produk Hukum Daerah yang Berkesesuaian dengan aturan di atasnya	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	
			Meningkatkan Ketersediaan Dokumentasi dan Informasi Produk Hukum Daerah		Persentase Produk Hukum Daerah yang terpublikasi di JDIIH		
				Terfasilitasinya Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	
				Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	Fasilitasi Bantuan Hukum	
				Terlaksananya Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	
			Mewujudkan Kerjasama Daerah yang baik / Optimal		Persentase Kerjasama yang Mendukung Program Unggulaan Pemerintah	Fasilitasi Kerjasama Daerah	
				Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri	
				Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Fasilitasi Kerjasama Luar Negeri	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CATATAN
				Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama	
		Meningkatkan Kualitas Kebijakan Pengelolaan Perekonomian Dan Pembangunan			Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)		
					Return Of Asset (ROA)		
					Nilai Kematangan Menejeman Resiko SETDA		
			Meningkatkan Kualitas Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan		Persentase Laporan Capaian Program Pembangunan	Prog. Perekonomian Dan Pembangunan	
					Persentase Rumusan Kebijakan yang Diimplementasikan di Bidang Perekonomian		
			Meningkatkan Perekonomian Daerah		Persentase Pengendalian Stabilitas Harga Bahan Pokok di Kabupaten Karimun	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	
					Persentase Kontribusi BUMD terhadap PAD		
					Persentase Percepatan Akses Keuangan Daerah di Kabupaten Karimun		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CATATAN
				Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	
				Terlaksananya Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	
				Terlaksananya Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	
				Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pendirian BUMD	
			Terimplementasinya Program Pembangunan Daerah yang Optimal		Persentase Target Realisasi Program Pembangunan Daerah yang Tercapai	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	
				Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	
				Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CATATAN
				Terlaksananya Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	
			Meningkatkan Transparansi Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Daerah		Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa melalui Tender Persentase Layanan Sistem Pengadaan secara Elektronik Persentase OPD yang Terlayani dalam Pembinaan dan dan Advokasi Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Daerah	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	
				Terlaksananya Pemilihan Penyedia melalui Bagian Pengadaan Barang / Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa melalui Tender / Seleksi	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	
				Terlaksananya Proses Lelang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Kabupaten Karimun melalui Sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CATATAN
				Terlaksananya Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	
			Mewujudkan Sinergitas Koordinasi Lintas Sektor dan Stakeholder di Bidang Sumber Daya Alam yang Optimal		Persentase Bahan Perumusan, Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan di Bidang Sumber Daya Alam yang direkomendasikan	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	
				Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	
				Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CATATAN
				Tertindakannya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	
		Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Setda			Nilai AKIP SETDA		
			Meningkatkan Kualitas Pelayanan dan Kinerja Setda		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
			Meningkatkan kualitas tata kelola perencanaan dan Keuangan sekretariat daerah		Persentase Laporan Keuangan yang tepat waktu Persentase keselarasan perencanaan dan penganggaran di sekretariat daerah	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CATATAN
				Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
				Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan Sekretariat Daerah		Persentase Penyerapan Anggaran SETDA Persentase Penyampaian Realisasi Fisik Keuangan Tepat Waktu	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CATATAN
				Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
				Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
				Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasidan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
			Meningkatkan Pengelolaan Aset SETDA		Persentase Laporan Penatausahaan Aset Setda	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
				Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
				Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CATATAN
				Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
			Meningkatkan Pelayanan Kepegawaian Sekretariat Daerah		Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian Rata-Rata Capaian Kinerja Pegawai SETDA	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
				Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
				Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CATATAN
				Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	
				Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
			Meningkatkan Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran		Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CATATAN
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
			Meningkatkan Sarana Prasarana Kerja yang Memadai		Persentase Rencana Kebutuhan Sarana Prasarana Kerja yang Terpenuhi Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah yang Terpenuhi	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Meningkatkan Pengelolaan Administrasi Umum Perkantoran		Persentase Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CATATAN
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantoryang Disediakan	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
			Meningkatkan Pemeliharaan Aset SETDA		Persentase Aset SETDA yang terpelihara	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CATATAN
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Meningkatkan Pengelolaan Pelayanan Administrasi Pimpinan		Persentase Pelayanan Administrasi Pimpinan	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
				Tersedianya Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CATATAN
				Terlaksananya Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
				Tersedianya Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
			Optimalnya Penanganan Kebutuhan Rumah Tangga KDH dan WKDH		Persentase rencana Kebutuhan Rumah Tangga KDH WKDH yang terealisasi	Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	
				Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	
				Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	
				Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	
			Meningkatkan Kinerja dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi		Persentase Kebijakan Bidang Organisasi yang diimplementasikan	Penataan Organisasi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CATATAN
					Persentase Persentase Reformasi Birokrasi yang Mendapat Nilai B	Penataan Organisasi	
			Meningkatkan Efektivitas Penerapan Kebijakan Bidang Organisasi		Persentase Kenaikan SKM OPD/ Penyelenggara Pelayanan Publik dan OPD yang Memiliki SOP dan Acuan Pelayanan Publik		
			Meningkatkan Fasilitasi, Pembinaan dan Kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten Karimun		Persentase OPD yang dibentuk dan dievaluasi Kelembagaan, SOTK dan Tupoksi		
				Terlaksananya Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	
				Terlaksananya Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	
				Terlaksananya Peningkatan Kinerja Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	
				Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CATATAN
				Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	
			Terfasilitasinya Pelaksanaan Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan		Persentase Terfasilitasinya Pelayanan Kunjungan kerja Pimpinan	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	
				Terlaksananya Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	Fasilitasi Keprotokolan	
				Terlaksananya Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	
				Terlaksananya Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	
			Meningkatkan Pemanfaatan Kawasan Perbatasan		Persentase Kawasan Perbatasan yang mendapat Prioritas Pembangunan	Program Pengelolaan Perbatasan	
			Terwujudnya Perencanaan Kerjasama yang Optimal		Persentase Perencanaan Kerjasama daerah yang baik	Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama	
				Terlaksananya Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CATATAN
				Tersusunnya Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan yang Disusun	Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan	
			Meningkatkan Pembangunan Kawasan Perbatasan		Persentase Usulan Infrastruktur Fisiki LOKPRI yang Terlaksana	Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan	
				Terlaksananya Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan	
				Terlaksananya Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan	
				Terlaksananya Penjagaan dan Pemeliharaan Tanda Batas Wilayah Negara	Jumlah Tanda Batas Wilayah Negara yang Dijaga dan Dipelihara	Penjagaan dan Pemeliharaan Tanda Batas Wilayah Negara	
				Terlaksananya Penjagaan dan Pemeliharaan Tanda Batas Daerah	Jumlah Tanda Batas Daerah yang Dijaga dan Dipelihara	Penjagaan dan Pemeliharaan Tanda Batas Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CATATAN
				Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Tugas Pembangunan di Kawasan Perbatasan di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi Pelaksanaan Tugas Pembangunan di Kawasan Perbatasan di Wilayah Kabupaten/Kota	Koordinasi Pelaksanaan Tugas Pembangunan Kawasan Perbatasan di Wilayah Kabupaten/Kota	
			Meningkatkan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan		Capaian monitoring dan Evaluasi Pembangunan Kawasan Perbatasan	Monitoring dan Evaluasi	
				Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	
				Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Laporan Pembangunan Kawasan Perbatasan	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	

Tabel. 4.2 Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan Pendanaan

TUJUAN	KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KET
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH, AKUNTABEL DAN MELAYANI															
	4.01.	SEKRETARIAT DAERAH				66.677.674.498		67.709.614.573		68.755.316.109		69.654.858.368		70.686.213.053	
	4.01.01	Prog. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kot a				43.141.219.171		43.651.470.010		44.087.984.710		44.730.918.158		45.501.444.179	
		Meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerja perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	80	81.30	43.141.219.171	81.36	43.651.470.010	81.40	44.087.984.710		44.730.918.158		45.501.444.179	
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				228,260,000		230,542,600		232,848,026		235,176,506		237,528,272	
		Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1	2	228.260.000	2	230.542.600	2	232.848.026	2	235.176.506	2	237.528.272	

TUJUAN	KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KET
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	1		1		1		1		1		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	2		2		2		2		2		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	3	1		1		1		1		1		

TUJUAN	KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KET
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				93.930.000		94.869.300		95.817.993		96.776.173		97.743.935	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1	2	93.930.000	2	94.869.300	2	95.817.993	2	96.776.173	2	97.743.935	
	4.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				20.200.000		20.402.000		20.606.020		20.812.080		21.020.201	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD(Dokumen)	2	2	20.200.000	2	20.402.000	2	20.606.020	2	20.812.080	2	21.020.201	

TUJUAN	KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KET
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	4.01.01.2.01.006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				93.930.000		94.869.300,		95.817.993		96.776.173,		97.743.935	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	3	1	93.930.000	1	94.869.300,	1	95.817.993	1	96.776.173,	1	97.743.935,	
	4.01.01.2.01.007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				20.200.000		20.402.000		20.606.020		20.812.080		21.020.201	

TUJUAN	KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KET
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	1	20.200.000	1	20.402.000	1	20.606.020	1	20.812.080	1	21.020.201	
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				25.485.989.200				26.073.804.217		26.536.595.859		27.125.178.658	
		Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan Sekretariat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2.040	2.520	25.485.989.200	2.590	25.815.647.740	2.660	26.073.804.217	2.730	26.536.595.859	2.800	27.125.178.658	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		

TUJUAN	KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KET
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1		
	4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				23.187.987.710		23.419.867.587		23.654.066.263		23.890.606.925		24.129.512.995	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	2.040	2.520	23.187.987.710	2.590	23.419.867.587	2.660	23.654.066.263	2.730	23.890.606.925	2.800	24.129.512.995	

TUJUAN	KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KET
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Tunjangan ASN (Orang/bulan)												
	4.01.01.2.02.002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				404.000.000		408.040.000		412.120.400		416.241.604		420.404.020	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1	1	404.000.000	1	408.040.000	1	412.120.400	1	416.241.604	1	420.404.020	
	4.01.01.2.02.003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD				1.869.761.490		1.963.257.753		1.982.890.330		2.204.772.834		2.550.037.402	
		Terlaksananya Penatausahaan	Jumlah Dokumen	1	1	1.869.761.490	1	1.963.257.753	1	1.982.890.330	1	2.204.772.834	1	2.550.037.402	

TUJUAN	KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KET
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)												
	4.01.01.2.02.005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				24.240.000		24.482.400		24.727.224		24.974.496		25.224.241	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	24.240.000	1	24.482.400	1	24.727.224	1	24.974.496	1	25.224.241	
	4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik				443.138.510		447.569.895		452.045.594		456.566.051		461.131.712	

TUJUAN	KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KET
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Daerah pada Perangkat Daerah													
		Meningkatkan Pengelolaan Aset Setda	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	1	443.138.510	1	447.569.895	1	452.045.594	1	456.566.051	1	461.131.712	
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	4	1		1		1		1		1		
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik	1	1		1		1		1		1		

TUJUAN	KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KET
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)												
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1		
	4.01.01.2.03.001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan				17.170.000		17.341.700		17.515.117		17.690.268		17.867.171	

TUJUAN	KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KET
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Barang Milik Daerah SKPD													
		Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1	17.170.000,00	1	17.341.700,00	1	17.515.117,00	1	17.690.268,00	1	17.867.171,00	
	4.01.01.2.03.003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				105.395.520		106.449.475		107.513.970		108.589.110		109.675.001	
		Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian	1	1	105.395.520	1	106.449.475	1	107.513.970	1	108.589.110	1	109.675.001	

TUJUAN	KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KET
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)												
	4.01.01.2.03.004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				127.799.340		129.077.333		130.368.107		131.671.788		132.988.506	
		Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	4	1	127.799.340	1	129.077.333	1	130.368.107	1	131.671.788	1	132.988.506	
	4.01.01.2.03.005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik				135.940.950		137.300.360		138.673.363		140.060.097		141.460.698	

TUJUAN	KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KET
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Daerah pada SKPD													
		Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	1	135.940.950	1	137.300.360	1	138.673.363	1	140.060.097	1	141.460.698	
	4.01.01.2.03.006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				56.832.700		57.401.027		57.975.037		58.554.788		59.140.336	
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	1	56.832.700	1	57.401.027	1	57.975.037	1	58.554.788	1	59.140.336	
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				323.200.000		326.432.000		329.696.320		332.993.283		336.323.216	

TUJUAN	KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KET
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Meningkatkan Pelayanan Kepegawaian Sekretariat Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	75	15	323.200.000	15	326.432.000	15	329.696.320	15	332.993.283	15	336.323.216	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	85	30		30		30		30		30		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi	1	1		1		1		1		1		

TUJUAN	KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KET
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Kepegawai an (Dokumen)												
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkap an (Paket)	1	1		1		1		1		1		
		4.01.01.2.05.000 2 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapanny a				50.500.000, 00		51.005.000		51.515.050		52.030.201		52.550.503	
		Tersedianya Pakaian Dinas	Jumlah Paket	1	1	50.500.000	1	51.005.000	1	51.515.050	1	52.030.201	1	52.550.503	

TUJUAN	KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KET
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		beserta Atribut Kelengkapan	Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)												
		4.01.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				42.420.000		42.844.200		43.272.642		43.705.368		44.142.422	
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1	1	42.420.000	1	42.844.200	1	43.272.642	1	43.705.368	1	44.142.422	
	4.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				43.430.000		43.864.300		44.302.943		44.745.972		45.193.432	

TUJUAN	KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KET
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	1	1	43.430.000	1	43.864.300	1	44.302.943	1	44.745.972	1	45.193.432	
	4.01.01.2.05.009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				101.000.000		102.010.000		103.030.100		104.060.401		105.101.005	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	85	30	101.000.000	30	102.010.000	30	103.030.100	30	104.060.401	30	105.101.005	
	4.01.01.2.05.011	Bimbingan Teknis Implementasi				85.850.000		86.708.500		87.575.585		88.451.341		89.335.854	

TUJUAN	KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KET
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Peraturan Perundang-Undangan													
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	75	15	85.850.000	15	86.708.500	15	87.575.585	15	88.451.341	15	89.335.854	
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.300.092.705		1.313.093.632		1.326.224.568		1.339.486.815		1.352.881.682	
		Meningkatkan Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	15	15	1.300.092.705	15	1.313.093.632	15	1.326.224.568	15	1.339.486.815	15	1.352.881.682	
			Jumlah Laporan	1	1		1		1		1		1		

TUJUAN	KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KET
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)												
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	10	10		10		10		10		10		

TUJUAN	KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KET
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	4.01.01.2.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				85.850.000		86.708.500		87.575.585		88.451.341		89.335.854	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	10	10	85.850.000	10	86.708.500	10	87.575.585	10	88.451.341	10	89.335.854	
	4.01.01.2.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				183.820.000		185.658.200		187.514.782		189.389.930		191.283.829	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	15	15	183.820.000	15	185.658.200	15	187.514.782	15	189.389.930	15	191.283.829	

TUJUAN	KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KET
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Disediakan (Paket)												
	4.01.01.2.06.005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				101.721.645		102.738.861		103.766.250		104.803.913		105.851.952	
		Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	101.721.645	1	102.738.861	1	103.766.250	1	104.803.913	1	105.851.952	
	4.01.01.2.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				928.701.060		937.988.071		947.367.951		956.841.631		966.410.047	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	1	1	928.701.060	1	937.988.071	1	947.367.951	1	956.841.631	1	966.410.047	

TUJUAN	KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KET
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			SKPD (Laporan)												
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				823.150.000		831.381.500		839.695.315		848.092.268		856.573.191	
		Meningkatkan Sarana Prasarana Kerja yang Memadai	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	50	15	823.150.000	15	831.381.500	15	839.695.315	15	848.092.268	15	856.573.191	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	10	10		10		10		10		10		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas	1	1		1		1		1		1		

TUJUAN	KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KET
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)												
	4.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				41.410.000		41.824.100		42.242.341		42.664.764		43.091.412	
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1	1	41.410.000	1	41.824.100	1	42.242.341	1	42.664.764	1	43.091.412	
	4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				314.110.000		317.251.100		320.423.611		323.627.847		326.864.126	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	50	15	314.110.000	15	317.251.100	15	320.423.611	15	323.627.847	15	326.864.126	

TUJUAN	KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KET
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	4.01.01 .2.07.0 010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				467.630.000		472.306.300		477.029.363		481.799.657		486.617.653	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	10	10	467.630.000	10	472.306.300	10	477.029.363	10	481.799.657	10	486.617.653	
	4.01.01 .2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				6.332.661.519		6.395.988.134		6.459.948.015		6.524.547.496		6.589.792.971	
		Meningkatkan Pengelolaan Administrasi Umum Perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	12	1	6.332.661.519	1	6.395.988.134	1	6.459.948.015	1	6.524.547.496	1	6.589.792.971	

TUJUAN	KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KET
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Kantor yang Disediakan (Laporan)												
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	1		1		1		1		1		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat	1	1		1		1		1		1		

TUJUAN	KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KET
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Menyurat (Laporan)												
	4.01.01.2.08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				101.662.560,00		102.679.186,00		103.705.977,00		104.743.037,00		105.790.468,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1	101.662.560,00	1	102.679.186,00	1	103.705.977,00	1	104.743.037,00	1	105.790.468,00	
	4.01.01.2.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				3.849.234.735,00		3.887.727.082,00		3.926.604.353,00		3.965.870.397,00		4.005.529.101,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	1	3.849.234.735,00	1	3.887.727.082,00	1	3.926.604.353,00	1	3.965.870.397,00	1	4.005.529.101,00	

TUJUAN	KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KET
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	4.01.01 .2.08.0 003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				1.711.124.224, 00		1.728.235.466, 00		1.745.517.821, 00		1.762.972.999, 00		1.780.602.729, 00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkap an Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	1.711.124.224, 00	12	1.728.235.466, 00	12	1.745.517.821, 00	12	1.762.972.999, 00	12	1.780.602.729, 00	
	4.01.01 .2.08.0 004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				670.640.000 ,00		677.346.400, 00		684.119.864,0 0		690.961.063,0 0		697.870.673,0 0	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	1	670.640.000 ,00	1	677.346.400, 00	1	684.119.864,0 0	1	690.961.063,0 0	1	697.870.673,0 0	

TUJUAN	KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KET
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.738.919.010,00		2.766.308.200,00		2.793.971.282,00		2.821.910.995,00		2.850.130.104,00	
		Meningkatkan Pemeliharaan Aset Setda	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	4	4	2.738.919.010,00		2.766.308.200,00		2.793.971.282,00		2.821.910.995,00		2.850.130.104,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/	12	11		11		11		11		11		

TUJUAN	KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KET
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Direhabilitasi (Unit)												
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	38	15		15		15		15		15		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	7	4		4		4		4		4		

TUJUAN	KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KET
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	5	5		5		5		5		5		
	4.01.01 .2.09.0 001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				363.408.100,00		367.042.181,00		370.712.603,00		374.419.729,00		378.163.926,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan	7	4	363.408.100,00	4	367.042.181,00	4	370.712.603,00	4	374.419.729,00	4	378.163.926,00	

TUJUAN	KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KET
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Jabatan	Pajaknya (Unit)												
	4.01.01.2.09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan , Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				691.842.930,00		698.761.359,00		705.748.973,00		712.806.463,00		719.934.527,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	38	15	691.842.930,00	15	698.761.359,00	15	705.748.973,00	15	712.806.463,00	15	719.934.527,00	

TUJUAN	KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KET
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	4.01.01 .2.09.0 006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				546.407.980 ,00		551.872.060,0 0		557.390.780,0 0		562.964.688,0 0		568.594.335, 00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	5	5	546.407.980 ,00	5	551.872.060,0 0	5	557.390.780,0 0	5	562.964.688,0 0	5	568.594.335, 00	
	4.01.01 .2.09.0 009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				448.440.00 0,00		452.924.400, 00		457.453.644, 00		462.028.180,0 0		466.648.462, 00	
		Terlaksana nya Pemelihara an/Rehabili tasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilita si (Unit)	12	11	448.440.00 0,00	11	452.924.400, 00	11	457.453.644, 00	11	462.028.180,0 0	11	466.648.462, 00	
	4.01.01 .2.09.0 010	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor				688.820.000 ,00		695.708.200, 00		702.665.282,0 0		709.691.935,0 0		716.788.854,0 0	

TUJUAN	KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KET
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		atau Bangunan Lainnya													
		Terlaksananya Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	4	4	688.820.000,00	4	695.708.200,00	4	702.665.282,00	4	709.691.935,00	4	716.788.854,00	
	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2.046.958.27,00		2.067.427.809,00		2.088.102.088,00		2.108.983.109,00		2.130.072.939,00	
		Meningkatnya Pengelolaan Pelayanan Administrasi	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical	2	2	2.046.958.27,00	2	2.067.427.809,00	2	2.088.102.088,00	2	2.108.983.109,00	2	2.130.072.939,00	

TUJUAN	KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KET
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Pimpinan	Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang)												
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1		
			Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala	24	24		24		24		24		24		

TUJUAN	KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KET
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/Bulan)												
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/Bulan)	24	28		28		28		28		28		
	4.01.01.2.11.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				976.358.227,00		986.121.809,00		995.983.028,00		1.005.942.858,00		1.016.002.286,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala	24	28	976.358.227,00	28	986.121.809,00	28	995.983.028,00	28	1.005.942.858,00	28	1.016.002.286,00	

TUJUAN	KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KET
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/Bulan)												
	4.01.01.2.11.002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				161.600.000,00		163.216.000,00		164.848.160,00		166.496.642,00		168.161.608,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	1	1	161.600.000,00	1	163.216.000,00	1	164.848.160,00	1	166.496.642,00	1	168.161.608,00	

TUJUAN	KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KET
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	4.01.01 .2.11.0 003Pe laksana naan	Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				303.000.000 ,00		306.030.000, 00		309.090.300, 00		312.181.203,00		315.303.015,0 0	
		Terlaksananya Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang)	2	2	303.000.000 ,00	2	306.030.000, 00	2	309.090.300, 00	2	312.181.203,00	2	315.303.015,0 0	
	4.01.01 .2.11.0 004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				606.000.000 ,00		612.060.000,0 0		618.180.600,0 0		624.362.406,0 0		630.606.030,0 0	
		Tersedianya Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang	24	24	606.000.000 ,00	24	612.060.000,0 0	24	618.180.600,0 0	24	624.362.406,0 0	24	630.606.030,0 0	

TUJUAN	KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KET
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Kepala Daerah	Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/Bulan)												
	4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah				1.262.500.000,00		1.275.125.000,00		1.287.876.250,00		1.300.755.012,00	1	1.313.762.562,00	
		Optimalnya Penanganan Kebutuhan Rumah Tangga KDH dan WKDH	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan (Paket)	1	1	1.262.500.000,00	1	1.275.125.000,00	1	1.287.876.250,00	1	1.300.755.012,00	1	1.313.762.562,00	
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala	1	1		1		1		1		1		

TUJUAN	KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KET
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Daerah yang Disediakan (Paket)												
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1		
	4.01.01.2.12.001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah				732.250.000,00		739.572.500,00		746.968.225,00		754.437.907,00		761.982.286,00	
		Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	1	1	732.250.000,00	1	739.572.500,00	1	746.968.225,00	1	754.437.907,00	1	761.982.286,00	

TUJUAN	KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KET
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	4.01.01 .2.12.0 002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah				530.250.000 ,00		535.552.500, 00		540.908.025, 00		546.317.105,0 0		551.780.276,0 0	
		Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga	1	1	530.250.000 ,00	1	535.552.500, 00	1	540.908.025, 00	1	546.317.105,0 0	1	551.780.276,0 0	
			Wakil Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)												
	4.01.01 .2.12.0 003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
		Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang	1	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	

TUJUAN	KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KET
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Disediakan (Paket)												
	4.01.01.2.13	Penataan Organisasi				484.800.000,00		493.688.000,00		498.624.880,00		503.611.130,00		508.647.241,00	
		Meningkatkan Efektifitas Penerapan Kebijakan Bidang Organisasi	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Laporan)	4	4	282.800.000	6	285.628.000	6	288.484.280	6	291.369.124	6	294.282.815	
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (Dokumen)	1	1		2		2		2		2		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendali	1	1		2		2		2		2		

TUJUAN	KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KET
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			An Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Dokumen)												
	4.01.01.2.13.002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana				181.800.000,00		183.618.000,00		185.454.180,00		187.308.722,00		189.181.809,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Laporan)	4	4	181.800.000,00	6	183.618.000,00	6	185.454.180,00	6	187.308.722,00	6	189.181.809,00	
	4.01.01.2.13.004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana				50.500.000,00		51.005.000,00		51.515.050,00		52.030.201,00		52.550.503,00	
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi	1	1	50.500.000,00	2	51.005.000,00	2	51.515.050,00	2	52.030.201,00	2	52.550.503,00	

TUJUAN	KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KET
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Dokumen)												
	4.01.01.213.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah				50.500.000,00		51.005.000,00		51.515.050,00		52.030.201,00		52.550.503,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (Dokumen)	1	1	50.500.000,00	2	51.005.000,00	2	51.515.050,00	2	52.030.201,00	2	52.550.503,00	
		Meningkatnya Fasilitas Pembinaan dan Kelembagaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan	5	5	101.000.000,00	6	106.050.000,00	7	107.110.500,00	7	108.181.605,00	7	109.263.421,00	

TUJUAN	KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KET	
					2026		2027		2028		2029		2030			
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		Kabupaten Karimun	Analisis Jabatan (Dokumen)													
	4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan				101.000.000,00		106.050.000,00		107.110.500,00		108.181.605,00		109.263.421,00		
		Terlaksananya Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan (Dokumen)	5	5	101.000.000,00	6	106.050.000,00	7	107.110.500,00	7	108.181.605,00	7	109.263.421,00		
		Meningkatnya Kinerja dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi (Dokumen)	2	2	101.000.000,00	5	102.010.000,00	6	103.030.100,00	6	104.060.401,00	6	105.101.005,00		
	4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				101.000.000,00		102.010.000,00		103.030.100,00		104.060.401,00		105.101.005,00		
		Terlaksananya Peningkatan	Jumlah Dokumen	2	2	101.000.000,00	5	102.010.000,00	6	103.030.100,00	6	104.060.401,00	6	105.101.005,00		

TUJUAN	KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KET
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi (Dokumen)												
	4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan				1.671.550.000,00		1.688.265.500,00		1.705.148.155,00		1.722.199.634,00		1.739.421.631,00	
		Terfasilitasinya Pelaksanaan Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan (Laporan)	2	2	1.671.550.000,00	2	1.688.265.500,00	2	1.705.148.155,00	2	1.722.199.634,00	2	1.739.421.631,00	
			Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan (Laporan)	4	4		4		4		4		4		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi	3	3		3		3		3		3		

TUJUAN	KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KET
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Pimpinan (Laporan)												
	4.01.01.2.14.001	Fasilitasi Keprotokolan				527.220.000,00		532.492.200,00		537.817.122,00		543.195.293,00		548.627.246,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan (Laporan)	2	2	527.220.000,00	2	532.492.200,00	2	537.817.122,00	2	543.195.293,00	2	548.627.246,00	
	4.01.01.2.14.002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				945.360.000,00		954.813.600,00		964.361.736,00		974.005.353,00		983.745.407,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan (Laporan)	3	3	945.360.000,00	3	954.813.600,00	3	964.361.736,00	3	974.005.353,00	3	983.745.407,00	
	4.01.01.2.14.003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan				198.970.000,00		200.959.700,00		202.969.297,00		204.998.988,00		207.048.978,00	
		Terlaksananya Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian	4	4	198.970.000,00	4	200.959.700,00	4	202.969.297,00	4	204.998.988,00	4	207.048.978,00	

TUJUAN	KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KET
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Tugas Pimpinan (Laporan)												
	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT				19.542.060.308,00		19.745.762.911,00		20.396.803.264,00		20.600.771.297,00		20.818.368.272,00	
		Meningkatkan kualitas kebijakan pemerintah dan kesejahteraan rakyat	Persentase Kelulusan Santri TPQ (Persentase)	98.52 %	99.32 %	19.542.060.308,00	99.33 %	19.745.762.911,00	99.35 %	20.396.803.264,00	99.35 %	20.600.771.297,00	99,37 %	20.818.368.272,00	
			Nilai Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Angka)	3,237	3,922			3,923		3,924		3,925		3,926	
	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan				2.200.769.800,00		2.222.777.498,00		2.245.005.273,00		2.267.455.326,00		2.290.129.880,00	
		Optimalnya Titik Wilayah Pemekaran Administrasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan	1	1	50.500.000,00	1	51.005.000,00	1	51.515.050,00	1	52.030.201,00	1	52.550.503,00	

TUJUAN	KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KET
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Administrasi Kewilayahan (Dokumen)												
	4.01.0 2.2.01. 0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan				50.500.000,00		51.005.000,00		51.515.050,00		52.030.201,00		52.550.503,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan (Dokumen)	1	1	50.500.000,00	1	51.005.000,00	1	51.515.050,00	1	52.030.201,00	1	52.550.503,00	
		Terimplementasinya Penyelenggaraan Tata Pemerintahan secara Optimal	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah (Dokumen)	1	1	2.150.269.800	2	2.171.772.498	2	2.193.490.223	2	2.215.425.125	2	2.237.579.377	

TUJUAN	KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KET
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan (Dokumen)	4	6		1		1		1		1		
	4.01.0 2.2.01. 0001	Penataan Administrasi Pemerintahan				1.747.300.000,00		1.764.773.000,00		1.782.420.730,00		1.800.244.937,00		1.818.247.387,00	
		Terlaksananya Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan (Dokumen)	4	6	1.747.300.000,00	1	1.764.773.000,00	1	1.782.420.730,00	1	1.800.244.937,00	1	1.818.247.387,00	
	4.01.0 2.2.01. 0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah				402.969.800,00		406.999.498,00		411.069.493,00		415.180.188,00		419.331.990,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi												

TUJUAN	KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KET
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Pelaksanaan Otonomi Daerah (Dokumen)	1	1	402.969.800,00	2	406.999.498,00	2	411.069.493,00	2	415.180.188,00	2	419.331.990,00	
	4.01.0 2.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat				16.043.440.508,00		16.203.874.913,00		16.819.496.386,00		16.987.691.349,00		17.169.157.524,00	
		Terwujudnya Kerukunan dan Harmonisasi Umat Beragama	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan,	12	4		4		4		4		4		

TUJUAN	KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KET
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas (Dokumen)												
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan	12	4	16.043.440.508,00	4	16.203.874.913,00	4	16.819.496.386,00	4	16.987.691.349,00	4	17.169.157.524,00	

TUJUAN	KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KET
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			n Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB (Dokumen)												
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga,	0	300		300		300		300		300		

TUJUAN	KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KET
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			dan Kelompok Masyarakat (Keluarga)												
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual (Dokumen)	12	4		4		4		4		4		
	4.01.0 2.2.02. 0001	Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual				8.771.925.000,00		8.859.644.250,00		9.401.823.417,00		9.495.841.651,00		9.590.800.067,00	
		Terlaksananya Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual (Dokumen)	12	4	8.771.925.000,00	4	8.859.644.250,00	4	9.401.823.417,00	4	9.495.841.651,00	4	9.590.800.067,00	
	4.01.0 2.2.02. 0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja				2.693.455.350,00		2.720.389.904,00		2.747.593.803,00		2.775.069.741,00		2.802.820.438,00	

TUJUAN	KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KET
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Terkait Kesejahteraan Sosial													
		Terlaksananya Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan												

TUJUAN	KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KET
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			kan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB (Dokumen)	12	4	2.693.455.350,00	4	2.720.389.904,00	4	2.747.593.803,00	4	2.775.069.741,00	4	2.802.820.438,00	
	4.01.0 2.2.02. 0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat Terlaksananya Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan	Jumlah Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan			4.296.849.450,00		4.339.817.945,00		4.383.216.124,00		4.427.048.285,00		4.471.318.768,00	

TUJUAN	KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KET
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Olahraga, Pariwisata, Pendidikan Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas (Dokumen),	12	4	4.296.849.450,00	4	4.339.817.945,00	4	4.383.216.124,00	4	4.427.048.285,00	4	4.471.318.768,00	
	4.01.02.2.02.0004	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat				281.210.708,00		284.022.814,00		286.863.042,00		289.731.672,00		304.218.251,00	
		Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga												

TUJUAN	KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KET
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Masyarakat	dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat (Keluarga)	0	300	281.210.708,00	300	284.022.814,00	300	286.863.042,00	300	289.731.672,00	300	304.218.251,00	
	4.01.0 2.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum				1.090.800.000,00		1.101.708.000,00		1.112.725.080,00		1.123.852.331,00		1.135.090.854,00	
		Meningkatnya Ketersediaan Dokumentasi dan Informasi Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi (Dokumen)	60	60	282.800.000,00	60	285.628.000,00	60	288.484.280,00	60	291.369.123,00	60	294.282.814,00	
	4.01.0 2.2.03. 0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan				282.800.000,00		285.628.000,00		288.484.280,00		291.369.123,00		294.282.814,00	

TUJUAN	KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KET	
					2026		2027		2028		2029		2030			
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		Informasi Hukum														
		Terlaksananya Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi (Dokumen)	60	60	282.800.000,00	60	285.628.000,00	60	288.484.280,00	60	291.369.123,00	60	294.282.814,00		
		Meningkatnya Kualitas Produk Hukum Daerah yang sesuai dengan Kebutuhan Masyarakat dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun (Dokumen)	480	520	303.000.000,00	550	306.030.000,00	570	309.090.300,00	600	312.181.203,00	630	315.303.015,00		
	4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah				303.000.000,00		306.030.000,00		309.090.300,00		312.181.203,00		315.303.015,00		

TUJUAN	KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KET
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Terfasilitasinya Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun (Dokumen)	480	520	303.000.000,00	550	306.030.000,00	570	309.090.300,00	600	312.181.203,00	630	315.303.015,00	
		Optimalnya Penanganan Perkara Litigasi dan Non Litigasi Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Hukum (Kasus)	2	3	505.000.000,00	3	510.050.000,00	3	515.150.500,00	3	520.302.005,00	3	525.505.025,00	
	4.01.0 2.2.03. 0002	Fasilitas Bantuan Hukum				505.000.000,00		510.050.000,00		515.150.500,00		520.302.005,00		525.505.025,00	
		Terlaksananya Fasilitas Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Hukum	2	3	505.000.000,00	3	510.050.000,00	3	515.150.500,00	3	520.302.005,00	3	525.505.025,00	

TUJUAN	KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KET
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			(Kasus)												
	4.01.0 2.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah				207.050.000,00		217.402.500,00		219.576.525,00		221.772.291,00		223.990.014,00	
		Terwujudnya Kerjasama Daerah yang Baik/Optimal	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri (Dokumen )	1	1	207.050.000,00	1	217.402.500,00	1	219.576.525,00	1	221.772.291,00	1	223.990.014,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri (Dokumen )	16	20		20		21		21		21		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama (Laporan)	1	1		1		1		1		1		

TUJUAN	KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KET
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4.01.02.2.04.000 1 - Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri				95.950.000,00		100.747.500,00		101.754.975,00		102.772.525,00		103.800.250,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri (Dokumen)	16	20	95.950.000,00	20	100.747.500,00	21	101.754.975,00	21	102.772.525,00	21	103.800.250,00	
		4.01.02.2.04.000 2 - Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri				50.500.000,00		53.025.000,00		53.555.250,00		54.090.803,00		54.631.711,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri (Dokumen)	1	1	50.500.000,00	1	53.025.000,00	1	53.555.250,00	1	54.090.803,00	1	54.631.711,00	
	4.01.02.2.04.0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama				60.600.000,00		63.630.000,00		64.266.300,00		64.908.963,00		65.558.053,00	

TUJUAN	KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KET
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksana an Kerja Sama (Laporan)	1	1	60.600.000, 00	1	63.630.000,0 0	1	64.266.300,00	1	64.908.963,00	1	65.558.053,0 0	
	4.01.0 3	PROGRAM PEREKONOMIA N DAN PEMBANGUNA N				3.994.395.01 9,00		4.312.381.652, 00		4.270.528.135, 00		4.323.168.913, 00		4.366.400.602 ,00	
		Meningkatkan kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan	Persentase Rumusan Kebijakan yang diimplemen tasikan di Bidang Perekono mian (Persenta se)	100	100	3.994.395.01 9,00	100	4.312.381.652, 00	100	4.270.528.135, 00	100	4.323.168.913, 00	100	4.366.400.602 ,00	
			Persentas e Laporan Capaian Realisasi Program	77	85		86		87		88		89		

TUJUAN	KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KET
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			pembangunan daerah (Persentase)												
	4.01.0 3.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian				2.097.500.000,00		2.352.375.000,00		2.224.398.750,00		2.246.642.738,00		2.269.109.165,00	
		Meningkatnya Perekonomian Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian (Laporan)	1	1	2.097.500.000,00	1	2.352.375.000,00	1	2.224.398.750,00	1	2.246.642.738,00	1	2.269.109.165,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro	1	1		1		1		1		1		

TUJUAN	KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KET
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Kecil (Dokumen)												
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD (Dokumen)	0	0		0		0		0		0		

TUJUAN	KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KET
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	4.01.0 3.2.01. 0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD				425.000.000,00		446.250.000,00		450.712.500,00		455.219.625,00		459.771.821,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD (Dokumen)	1	1	425.000.000,00	1	446.250.000,00	1	450.712.500,00	1	455.219.625,00	1	459.771.821,00	
	4.01.0 3.2.01. 0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian				375.000.000,00		393.750.000,00		397.687.500,00		401.664.375,00		405.681.019,00	
		Terlaksananya Pengendalian	Jumlah Laporan Hasil	1	1	375.000.000,00	1	393.750.000,00	1	397.687.500,00	1	401.664.375,00	1	405.681.019,00	

TUJUAN	KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KET
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		dan Distribusi Perekonomian	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian (Laporan)												
	4.01.0 3.2.01. 0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil				1.297.500.000,00		1.362.375.000,00		1.375.998.750,00		1.389.758.738,00		1.403.656.325,00	
		Terlaksananya Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil (Dokumen)	1	1	1.297.500.000,00	1	1.362.375.000,00	1	1.375.998.750,00	1	1.389.758.738,00	1	1.403.656.325,00	
	4.01.0 3.2.01. 0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD				0,00		150.000.000,00		0,00		0,00		0,00	

TUJUAN	KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KET
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD (Dokumen)	0	0	0,00	1	150.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
	4.01.0 3.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan				282.800.000,00		296.940.000,00		299.909.400,00		302.908.494,00		305.937.579,00	
		Terimplementasinya Program Pembangunan Daerah yang Optimal	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan Daerah (Dokumen)	1	1	282.800.000,00	1	296.940.000,00	1	299.909.400,00	1	302.908.494,00	1	305.937.579,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengesahan	1	1		1		1		1		1		

TUJUAN	KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KET
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			ndalia n dan Evalu asi Program Pembang unan (Laporan)												
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaa n Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaa n Pembangun an (Laporan)	1	1		1		1		1		1		
		4.01.03.2.02.000 1 - Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan				106.050.000,00		111.352.500,00		112.466.025,00		113.590.685,00		114.726.592,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi	1	1	106.050.000,00	1	111.352.500,00	1	112.466.025,00	1	113.590.685,00	1	114.726.592,00	

TUJUAN	KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KET
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Program Pembangunan	Penyusunan Program Pembangunan Daerah (Dokumen)												
	4.01.0 3.2.02. 0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan				101.000.000,00		106.050.000,00		107.110.500,00		108.181.605,00		109.263.421,00	
		Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan (Laporan)	1	1	101.000.000,00	1	106.050.000,00	1	107.110.500,00	1	108.181.605,00	1	109.263.421,00	
	4.01.0 3.2.02. 0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan				75.750.000,00		79.537.500,00		80.332.875,00		81.136.204,00		81.947.566,00	

TUJUAN	KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KET
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Terlaksananya Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan (Laporan)	1	1	75.750.000,00	1	79.537.500,00	1	80.332.875,00	1	81.136.204,00	1	81.947.566,00	
	4.01.0 3.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				1.386.845.019,00		1.426.507.212,00		1.497.832.573,00		1.512.810.899,00		1.527.939.008,00	
		Meningkatkan Transparansi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Dokumen)	10	10	1.386.845.019,00	10	1.426.507.212,00	10	1.497.832.573,00	10	1.512.810.899,00	10	1.527.939.008,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan	30	30		25		25		20		20		

TUJUAN	KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KET
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Pengadaan Barang dan Jasa (Dokumen)												
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa (Orang)	51	51		51		51		51		51		
	4.01.0 3.2.03. 0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				742.001.429,00		749.421.443,00		786.892.515,00		794.761.441,00		802.709.055,00	
		Terkelolanya Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (Dokumen)	30	30	742.001.429,00	25	749.421.443,00	25	786.892.515,00	20	794.761.441,00	20	802.709.055,00	

TUJUAN	KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KET
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	4.01.0 3.2.03. 0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik				262.600.000,00		275.730.000,00		289.516.500,00		292.411.665,00		295.335.782,00	
		Terkelolanya Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Dokumen)	10	10	262.600.000,00	10	275.730.000,00	10	289.516.500,00	10	292.411.665,00	10	295.335.782,00	
	4.01.0 3.2.03. 0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa				382.243.590,00		401.355.769,00		421.423.558,00		425.637.793,00		429.894.171,00	
		Terlaksananya Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa (Orang)	51	51	382.243.590,00	51	401.355.769,00	51	421.423.558,00	51	425.637.793,00	51	429.894.171,00	

TUJUAN	KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KET
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	4.01.0 3.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam				227.250.000,00		236.559.440,00		248.387.412,00		260.806.782,00		263.414.850,00	
		Terwujudnya Sinergitas Koordinasi Lintas Sektor dan Stakeholder di Bidang Sumber Daya Alam yang Optimal	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan (Dokumen)	1	1	227.250.000,00	1	236.559.440,00	1	248.387.412,00	1	260.806.782,00	1	263.414.850,00	
			Jumlah Dokumen Hasil	1	1		1		1		1		1		

TUJUAN	KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KET
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja (Dokumen)												
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan	1	1		1		1		1		1		

TUJUAN	KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KET
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian (Dokumen)												
	4.01.0 3.2.04. 0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan				126.250.000,00		132.562.500,00		139.190.625,00		146.150.156,00		147.611.658,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian,	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan	1	1	126.250.000,00	1	132.562.500,00	1	139.190.625,00	1	146.150.156,00	1	147.611.658,00	

TUJUAN	KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KET
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja (Dokumen)												
	4.01.03.2.04.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup				50.500.000,00		53.025.000,00		55.676.250,00		58.460.063,00		59.044.663,00	
		Tertindakannya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi,	1	1	50.500.000,00	1	53.025.000,00	1	55.676.250,00	1	58.460.063,00	1	59.044.663,00	

TUJUAN	KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KET
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian (Dokumen)												
	4.01.03.2.04.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air				50.500.000,00		50.971.940,00		53.520.537,00		56.196.563,00		56.758.529,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan	1	1	50.500.000,00	1	50.971.940,00	1	53.520.537,00	1	56.196.563,00	1	56.758.529,00	

TUJUAN	KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KET
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan (Dokumen)												
	5.06	PENGELOLAAN PERBATASAN				715.080.000,00		722.230.800,00		729.453.108,00		736.747.639,00		744.115.115,00	
	5.06.02	PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN				715.080.000,00		722.230.800,00		729.453.108,00		736.747.639,00		744.115.115,00	
	5.06.02.2.01	Meningkatnya pengelolaan wilayah perbatasan	Jumlah Lokasi Prioritas Wilayah Perbatasan (Lokasi)	7	7	715.080.000,00	7	722.230.800,00	7	729.453.108,00	7	736.747.639,00	7	744.115.115,00	

TUJUAN	KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KET
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Perencanaan dan Fasilitas i Kerja Sama				73.730.000,00		74.467.300,00		75.211.973,00		75.964.093,00		76.723.734,00	
		Terwujudnya Perencanaan Kerjasama yang Optimal	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah (Dokumen)	0	0	73.730.000,00	0	74.467.300,00	0	75.211.973,00	0	75.964.093,00	0	76.723.734,00	
			Jumlah Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan yang Disusun (Dokumen)	1	1		0		0		0				

TUJUAN	KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KET
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	5.06.0 2.2.01. 0001	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah (Dokumen)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
	5.06.0 2.2.01. 0002	Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan				73.730.000,00		74.467.300,00		75.211.973,00		75.964.093,00		76.723.734,00	
		Tersusunnya Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan yang	1	1	73.730.000,00		74.467.300,00		75.211.973,00		75.964.093,00		76.723.734,00	

TUJUAN	KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KET
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Disusun (Dokumen)												
	5.06.0 2.2.02	Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan				489.850.000,00		494.348.500,00		499.695.985,00		504.692.945,00		509.739.875,00	
		Meningkatnya Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Tanda Batas Wilayah Negara yang Dijaga dan Dipelihara (Dokumen)	2	2	489.850.000,00	2	494.348.500,00	2	499.695.985,00	2	504.692.945,00	2	509.739.875,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan (Dokumen)	7	7		7		7		7		7		
			Jumlah Dokumen Hasil	25	30		30		30		31		31		

TUJUAN	KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KET
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan (Dokumen)												
			Jumlah Laporan Koordinasi Pelaksanaan Tugas Pembangunan di Kawasan Perbatasan di Wilayah Kabupaten/ Kota (Laporan)	15	15		15		15		15		15		
			Jumlah Tanda Batas Daerah yang Dijagakan	10	10		10		10		10		10		

TUJUAN	KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KET
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Dipelihara (Dokumen)												
	5.06.0 2.2.02. 0001	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan				141.400.000,00		142.414.000,00		144.242.140,00		145.684.561,00		147.141.407,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan (Dokumen)	25	30	141.400.000,00	30	142.414.000,00	30	144.242.140,00	31	145.684.561,00	31	147.141.407,00	
	5.06.0 2.2.02. 0002	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan				95.950.000,00		96.909.500,00		97.878.595,00		98.857.381,00		99.845.955,00	
		Terlaksananya Koordinasi,	Jumlah Dokumen	7	7	95.950.000,00	7	96.909.500,00	7	97.878.595,00	7	98.857.381,00	7	99.845.955,00	

TUJUAN	KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KET
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan	Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan (Dokumen)												
	5.06.0 2.2.02. 0003	Penjagaan dan Pemeliharaan Tanda Batas Wilayah Negara				75.750.000,00		76.507.500,00		77.272.575,00		78.045.301,00		78.825.754,00	
		Terlaksananya Penjagaan dan Pemeliharaan Tanda Batas Wilayah Negara	Jumlah Tanda Batas Wilayah Negara yang Dijaga dan Dipelihara (Dokumen)	2	2	75.750.000,00	2	76.507.500,00	2	77.272.575,00	2	78.045.301,00	2	78.825.754,00	
	5.06.0 2.2.02. 0004	Penjagaan dan Pemeliharaan Tanda Batas Daerah				75.750.000,00		76.507.500,00		77.272.575,00		78.045.301,00		78.825.754,00	

TUJUAN	KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KET
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Terlaksananya Penjagaan dan Pemeliharaan Tanda Batas Daerah	Jumlah Tanda Batas Daerah yang Dijaga dan Dipelihara (Dokumen)	10	10	75.750.000, 00	10	76.507.500,0 0	10	77.272.575,00	10	78.045.301,00	10	78.825.754,0 0	

### 4.3 Program Prioritas

Program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karimun merupakan janji-janji kampanye dan strategis untuk dilaksanakan pada tahun 2025-2029. Program prioritas ini salah satu dukungan pencapaian Visi dan Misi. Program Prioritas 2025-2029, meliputi :

Tabel 4.3

Program Prioritas PD dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	KET
1	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat yang Optimal	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
			Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spritual	
			Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	
			Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	
			Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerjasama antar Keluarga, Warga dan Kelompok Masyarakat	
2	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Terwujudnya Perekonomian dan Pembangunan Daerah yang Kondusif	Program Perekonomian Dan Pembangunan	
			Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	
			Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	
			Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	
			Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	
			Koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pendirian BUMD	

#### 4.4 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex ante*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex post*).

Kinerja penyelenggaraan urusan SETDA Kabupaten Karimun yang disajikan berupa target kinerja penyelenggaraan urusan Kesekretariatan selama periode 2025- 2029 sebagaimana periode RPJMD dan Renstra PD 2025-2029. Indikator kinerja terdiri atas indikator dampak (*impact*) yang menggambarkan capaian dari tujuan dan sasaran perangkat daerah, serta indikator kinerja hasil (*outcome*) untuk menggambarkan capaian kinerja dari implementasi program perangkat daerah SETDA Kabupaten Karimun selama periode rencana.

Indikator kinerja dampak (*impact*) yang menggambarkan capaian tujuan dan sasaran perangkat daerah sejatinya akan menjadi indikator kinerja utama (IKU) perangkat daerah yang dipertanggungjawabkan oleh kepala OPD pencapaian IKU Bupati dan Wakil Bupati selama periode yang sama. Sedangkan indikator kinerja hasil (*outcome*) yang menggambarkan capaian dari implementasi program SETDA dijadikan sebagai indikator kinerja kunci (IKK) yang akan menjadi bagian dari kinerja yang harus dipertanggungjawabkan para pejabat eselon III lingkup SETDA untuk mendukung pencapaian IKU perangkat daerah.

Indikator ini akan menggambarkan pengelolaan SETDA yang semakin membaik dari tahun ke tahun. Sehingga pada saat yang sama tergambar bahwa terjadi peningkatan kinerja SETDA yang semakin baik. Selengkapnya target-target capaian kinerja SETDA Kabupaten Karimun untuk periode 2025-2029 yang akan datang disajikan pada tabel 4.4

dan tabel 4.5 berikut ini.

**Tabel 4.4**  
**Indikator Kinerja Utama (IKU)**

NO	INDIKATOR	SATUAN	Base Line 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)	Angka	0	4,52	4,55	4,58	4,61	4,64	4,66	Bag. Perekonomian
2	Indeks Reformasi Hukum	Angka	0	65	70	75	80	85	90	Bag. Hukum
3	Return Of Asset (ROA)	Angka	0	18	18,50	19	19,60	20	20,50	Bag. Perekonomian
4	Nilai AKIP SETDA	Angka	76.25	74.00	74.20	74.40	74.60	74.80	75.00	Bagian Perencanaan
5	Nilai Kematangan Manajemen Resiko SETDA	Angka	3.00	3,60	3,80	4,00	4,20	4,40	4,50	Bagian Adm. Pembangunan

Tabel 4.5  
Indikator Kinerja Kunci (IKK)

NO.	INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>AD</b>	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>									
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai		81.26	81.30	81.36	81.40	81.46	81.50	sudah disesuaikan
2	Nilai Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	Angka		3.917	3.922	3.923	3.924	3.925	3.926	sudah disesuaikan
3	Persentase Kelulusan Santri TPQ	Persentase		99.31	99.32	99.33	99.35	99.36	99.37	sudah disesuaikan
4	Persentase Laporan Capaian Realisasi Program Pembangunan Daerah	Persentase		84	85	86	87	88	89	sudah disesuaikan
5	Persentase Rumusan Kebijakan yang Diimplementasikan di Bidang Perekonomian	Persentase		100	100	100	100	100	100	sudah disesuaikan

## BAB V PENUTUP

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Perangkat Daerah yang memuat Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai penjabaran lebih rinci dari RPJMD Kabupaten Karimun Tahun 2025-2029. Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun merupakan pedoman bagi seluruh Unit Kerja di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Sesuai dengan perkembangan lingkungan eksternal dan internal yang terus mengalami perubahan, maka Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun tahun 2025-2029 tidak bersifat kaku dan senantiasa harus memperhatikan perubahan-perubahan yang terjadi dan secara periodik dilakukan evaluasi yang hasilnya dituangkan dalam revisi renstra sehingga tujuan organisasi dapat tercapai.

Selanjutnya Renstra ini akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Lapkin) Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun sebagai bentuk pertanggungjawaban dari hasil pelaksanaan perencanaan kerja setiap tahunnya. Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun perlu dipahami seluruh jajaran Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun agar dapat dilaksanakan secara sungguh-sungguh sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Akhirnya, komitmen dan semangat untuk menjadi semakin lebih berkinerja dari seluruh unsur Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun adalah kunci keberhasilan pencapaian target kinerja yang disusun dalam dokumen ini.

Tanjung Balai Karimun, 2025



## CASCADING SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2025-2029





